

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI
PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG**

TESIS

Diajukan Oleh

HAERANI HALIM

4616104048



**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2019

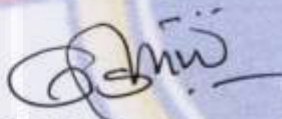
HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi
Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Kabupaten Enrekang.
2. Nama Mahasiswa : Haerani Halim
3. NIM : 4616104048
4. Program Studi : Manajemen

telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada Tanggal 29 Februari 2019
dan telah diperbaiki

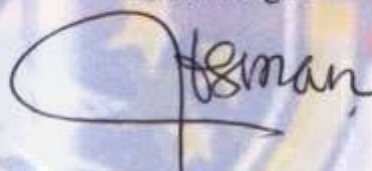
Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Osman Lewangka, MA

Pembimbing II



Dr. Firman Menne, S.E., M.Si., Ak., CA.

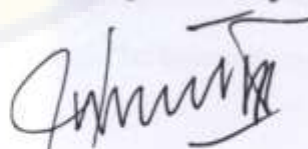
Mengetahui

Direktur
Program Pascasarjana



Prof. Dr. Batara Surya, S.T., M.Si.

Ketua Program Studi
Magister Manajemen



Dr. Hasanuddin Remmang, S.E., M.Si.

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari/Tanggal : 29 Februari 2019

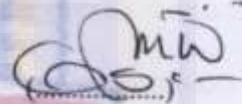
Tesis atas Nama : Haerani Halim

NIM : 4616104048

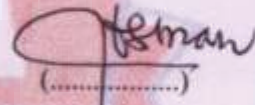
Telah Diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi Manajemen.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Prof. Dr. H. Osman Lewangka, MA
(Pembimbing I)



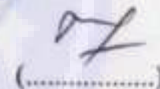
Sekretaris : Dr. Firman Menne, S.E., M.Si., Ak.,CA
(Pembimbing II)



Anggota Penguji : Dr. H. Muhammad Yusuf Saleh, SE., M.Si.

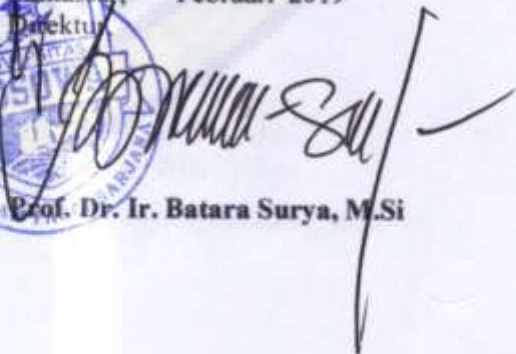


Dr. Miah Said, SE., M.Si



Makassar, Februari 2019

Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Haerani Halim

Nomor Mahasiswa : 4616104048

Program Studi : Magister Manajemen

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan atau daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan tesis, saya bersedia tesis dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Februari 2019
Mahasiswa,



HAERANI HALIM
Nim : 4616104048

PRAKATA



Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT pencipta alam semesta beserta isinya, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah serta petunjuk kepada setiap makhluk ciptaan-Nya, termasuk penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **"Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang"**.

Salam dan shalawat dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang pencerah yang menuntun ummatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang dengan segala ilmu dan ajarannya. Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister pada Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar, disamping memberikan pengalaman kepada penulis untuk meneliti dan menyusun karya ilmiah berupa tesis. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis diberi bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara materi maupun moril. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

Kedua orang tua Drs. Abd. Halim Coni dan Hj. Nurratna Nassa, S.Pd atas segala pengorbanan, doa, dan kasih sayang yang tidak pernah putus diberikan untuk penulis, My lovely kedua anaku: Mikhaila Azkadina dan Radhitya El Shaka serta Adikku: Hendra Halim, S.Pd atas segala doa yang diberikan.

Ketua Yayasan Universitas Bosowa Makassar Hj. Melinda Aksa yang menyediakan fasilitas untuk digunakan selama menjadi mahasiswa Program Studi Magister Manajemen pada Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar. Rektor Universitas Bosowa Makassar Prof. Dr. Ir. H. Muh. Saleh Pallu, M.Eng yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Program Studi Magister Manajemen pada Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.

Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar Prof. Dr. Batara Surya, M.Si yang telah memberikan kesempatan dan memfasilitasi kebutuhan akademik penulis untuk belajar sungguh-sungguh sehingga pada akhirnya upaya belajar pada program ini dapat terselesaikan dengan baik.

Ketua Program Studi Magister Manajemen Dr. Hasanuddin Remmang, SE., M.Si., yang telah banyak melayani dan mengarahkan penulis mulai dari sejak penerimaan hingga selesai dari program magister ini dengan tulus dan ikhlas, kedisiplinan yang tinggi dan kearifan dalam melayani dan mengarahkan tentang apa yang harus dilakukan oleh penulis dalam menyelesaikan program magister ini.

Bapak Prof. Dr. H. Osman Lewangka, MA selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis mulai dari awal hingga selesainya penyusunan tesis ini dan juga telah banyak meluangkan waktu dan tempat dalam penyusunan tesis ini. Beliau dengan penuh perhatian dan ketelitian mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan tesis ini.

Tim Penguji Bapak Dr. H. Muhammad Yusuf Saleh, SE., M.Si., dan Dr. Miah Said, SE., M.Si., sebagai tim penguji yang telah banyak memberikan saran dan masukan yang sangat berharga dalam rangka penyempurnaan penyusunan tesis ini.

Para dosen dan staf yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah banyak memotivasi, mendorong, dan berdiskusi dengan penulis dalam menyelesaikan program magister ini. Para aparatur pemerintah yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengumpulkan data-data penelitian.

Sahabat-sahabat ku tercinta Suarsy, Melinda Lestari, Reny Lia Amelia, serta teman-teman seperjuangan (*fighter of thesis*). Terima kasih atas segala tawa dan masukan yang kalian berikan serta kesabaran kalian, dan semangatnya selama penulisan tesis ini serta pengalaman yang tak terlupakan selama perkuliahan.

Tesis ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan tesis ini. Akhir kata, penulis berharap agar tesis ini dapat mendatangkan manfaat bagi pembaca.

Makassar, Februari 2019
Penulis,



Haerahi Halim

ABSTRACT

Haerani Halim. *Effect of Accountability, Transparency and Participation in Budgeting on the Financial Performance of Enrekang Regency Government.* (supervised by **H. Osman Lewangka** and **Firman Menne**)

This research was conducted with the aim of finding out the Effect of Accountability, Transparency and Participation in Budgeting on the Financial Performance of Enrekang Regency. This study uses primary data, namely the questionnaire. The population in this study was the Head of Office, Head of Financial Subdivision, Head of Subdivision of Planning and Treasurer of Expenditures in 14 Regional Device Organizations totaling 56 respondents. The analytical method used is multiple linear regression analysis and statistical calculations using the SPSS program.

The results of this study indicate that partially the variables of accountability and transparency have a positive and significant effect while budgeting participation has no positive and significant effect but simultaneously accountability, transparency and budgetary participation have a positive and significant effect on the financial performance of Enrekang Regency. This means that increasing accountability, transparency and budgetary participation will increase financial performance.

Keywords: accountability, transparency, participation in budgeting and financial performance.

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEORSINILAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Lingkup Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	11
A. Deskripsi Teori	11
1. Akuntabilitas	12
2. Transparansi	19
3. Partisipasi Penyusunan Anggaran.....	23
4. Kinerja Keuangan Pemerintah	27
B. Penelitian Terdahulu	32
C. Kerangka Pikir	34

D. Hipotesis	37
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi dan Jadwal Penelitian	42
C. Populasi dan Sampel	42
D. Variabel Penelitian	43
E. Instrumen Penelitian	44
F. Jenis dan Sumber Data	45
G. Teknik Pengumpulan Data	46
H. Teknik Analisa Data	46
I. Defenisi Operasional	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	60
1. Kondisi Geografis	60
2. Kondisi Topografi.....	61
3. Penduduk	61
4. Kondisi ekonomi.....	61
B. Hasil Penelitian	65
1. Karakteristik Responden.....	65
2. Deskripsi Variabel Penelitian	68
3. Uji Validitas dan Reabilitas.....	78
4. Uji asumsi Klasik.....	80
5. Uji Analisis Linear Berganda	85
C. Pembahasan	91
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	98
A. Simpulan.....	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100

DAFTAR TABEL

4.1	Peneliti Terdahulu	32
4.2	Deskripsi Responden Menurut Jenis Kelamin.....	65
4.2	Deskripsi Responden Menurut Umur	66
4.3	Deskripsi Responden Menurut Tingkat Pendidikan	66
4.4	Deskripsi Responden Menurut Jenis Jabatan.....	67
4.5	Distribusi Frekwensi Variabel Akuntabilitas (X1).....	68
4.6	Distribusi Frekwensi Variabel Transparansi (X2)	71
4.7	Distribusi Frekwensi Variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran (X3)	73
4.8	Distribusi Frekuensi Variabel Kinerja Keuangan Kabupaten Enrekang (Y)	75
4.9	Rekapitulasi Hasil Uji Validitas	78
4.10	Rekapitulasi Hasil Uji Reabilitas	79
4.11	Hasil Pemeriksaan Multikolinearitas	81
4.12	Uji Gletser (Heteroskedastisitas).....	82
4.13	Uji Linearitas	83
4.14	Uji Autokorelasi	84
4.15	Analisis Regresi Linear Berganda.....	85
4.16	Nilai Koefisien Determinasi (R ²).....	87
4.17	Hasil Pengujian Secara Parsial (Uji t).....	88
4.18	Hasil Pengujian Secara Simultan (Uji F).....	90

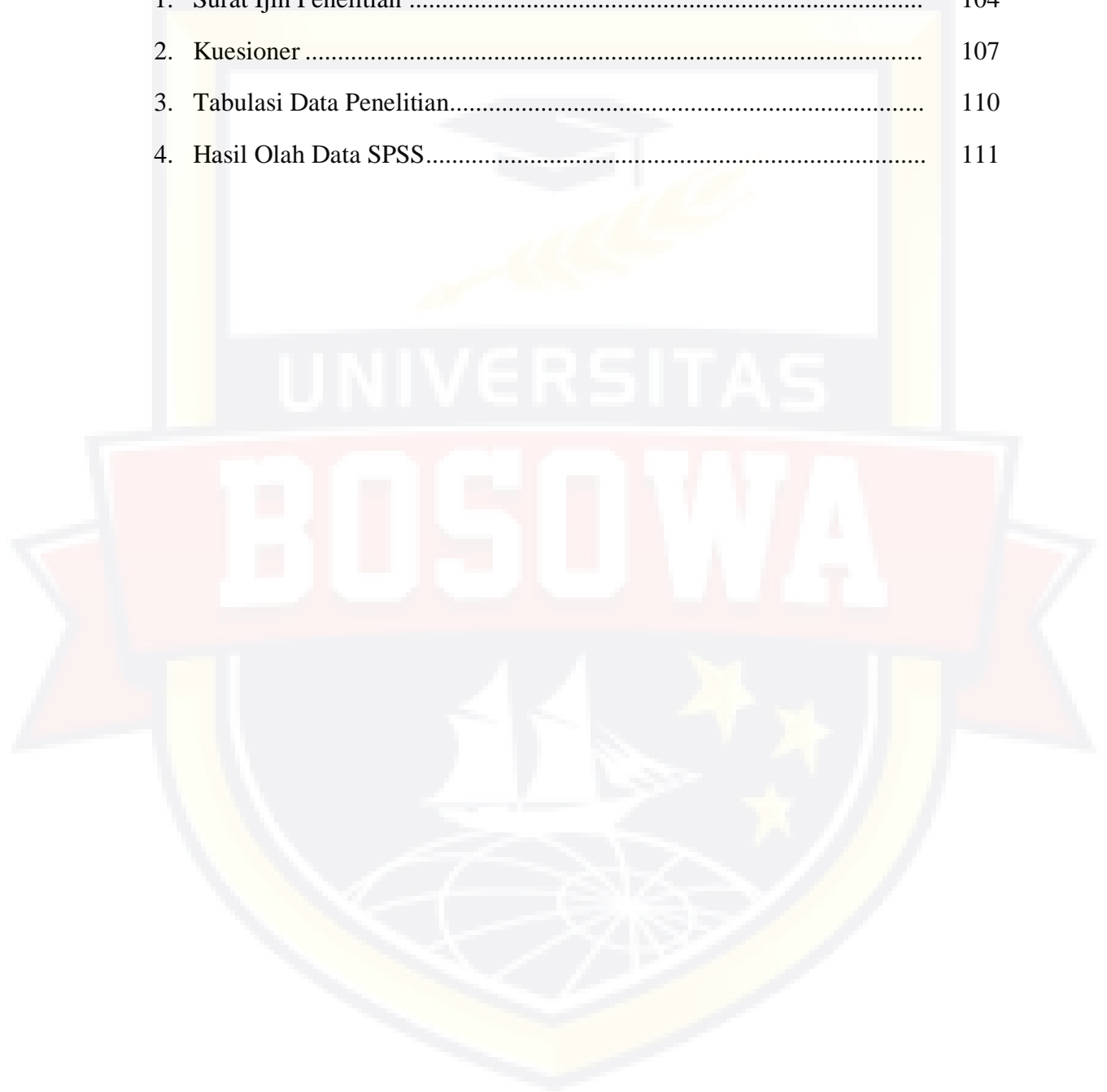
DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran	36
4.1 Grafik Hasil Uji Normalitas	80



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Ijin Penelitian	104
2. Kuesioner	107
3. Tabulasi Data Penelitian.....	110
4. Hasil Olah Data SPSS.....	111



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demi mewujudkan tujuan dan cita-cita masyarakat maka syarat yang dipenuhi pemerintah adalah dilaksanakannya *Good Governance*. Otonomi daerah yang diberlakukan secara efektif membuat perubahan signifikan dan fundamental pada Negara Indonesia. Ini di sambut dengan disahkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No, 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dipengaruhi berubahnya pandangan pemerintah dari terpusat ke otonomi daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bertatakelola baik (*Good Governance*). Konsekuensi bagi daerah yakni dituntut untuk mempertanggungjawabkan alokasi dana yang dimiliki secara efisien dan efektif pengalokasian dana yang sebaik-baiknya, maka implikasinya pada pertumbuhan daerah dapat berjalan sesuai harapan.

Good Governance (tata pemerintahan yang baik) merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Model-model penyelenggaraan pemerintahan yang sebelumnya sudah dianggap kurang sesuai lagi terhadap perubahan tatanan masyarakat dan pemerintahan saat ini. Karenanya kurang tuntutan *good governance* merupakan hal yang wajar dan seharusnya direspon oleh semua kalangan dengan melakukan perubahan yang terarah agar terealisasi peningkatan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan

penyelenggaraan *good governance* diharapkan pemerintah menjadi semakin peduli terhadap kepentingan warga masyarakatnya (Dwiyanto, 2005).

Mardiasmo (2009) mengemukakan bahwa adanya tuntutan reformasi sektor publik diharapkan agar dapat terbentuk organisasi sektor publik yg ekonomis, transparan, efektif, responsive serta memiliki akuntabilitas yang tinggi, sehingga adalah untuk menciptakan tata kelola yang baik *good governance*. Hal ini juga merupakan upaya untuk menyelenggarakan manajemen pembangunan yang baik serta bertanggungjawab sejalan dengan prinsip demokrasi, efisien, pencegahan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), baik secara politik maupun demokrasi.

Menurut UNDP (dalam LAN dan BPKP, 2000) mengemukakan prinsip-prinsip karakteristik, *good governance* di antaranya adalah transparansi dan akuntabilitas, dengan melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* tentu akan berpengaruh pada kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Hal ini dapat diberikan kesimpulan bahwa apabila pelaksanaan *good governance* ditingkatkan maka otomatis dapat meningkatkan kinerja organisasi itu sendiri (Mulyawan, 2009).

Kinerja pemerintah sejak tahapan penyusunan, pembahasan hingga pengesahan APBD dan laporan keterangan atas pertanggungjawaban, difokuskan umumnya pada besaran biaya yang dianggarkan, atau dengan kata lain semata-mata jumlah anggaran yang mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya. Terserapnya anggaran lebih diutamakan daripada menghemat anggaran, sehingga terjadi penggunaan anggaran untuk hal-hal

yang tidak perlu, bahkan melenceng dari target atau tujuan kinerja pemerintah. Pengukuran kinerja adalah proses yang berurutan guna memberikan penilaian apakah rencana program atau kegiatan telah dilaksanakan dengan sesuai, dan telah berhasil memenuhi target yang sebelumnya telah ditentukan saat perencanaan. Pengukuran kinerja diawali dengan menetapkan indikator kinerja guna menyediakan informasi yang memungkinkan unit kerja dalam memantau kinerjanya dalam mencapai *output* dan *outcome* terhadap masyarakat. Bagi para pengambil keputusan, pengukuran kinerja memberi manfaat dalam memantau dan melakukan perbaikan kinerja serta tetap fokus pada tujuan organisasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas akuntabilitas (Anugriani, 2013).

Berjalannya reformasi semakin menghidupkan kembali arti demokrasi dalam kehidupan bernegara. Demokrasi identik halnya dengan akuntabilitas. Menerapkan akuntabilitas berarti menerapkan transparansi pula sehingga diantara akuntabilitas dengan transparansi memiliki keterkaitan (Mohammad dkk, 2004). Akuntabilitas merupakan kemauan memberikan penjelasan dan justifikasi keinginan dan perbuatan kepada yang berkepentingan (Hunt, 2006). Lain hal dengan transparansi yakni mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberi informasi yang relevan atau laporan yang terbuka pada pihak luar atau organisasi mandiri (legislatur, auditor, publik) dan dipublikasikan (Haryatmoko, 2011).

Perwujudan dari akuntabilitas, transparansi dan pertanggungjawaban dapat dicapai dalam pengelolaan keuangan daerah. Anggaran belanja

organisasi berorientasi laba maupun sektor publik menggunakan *Value for money (VFM)* sebagai tolak ukurnya. Penilaian ini meliputi efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Hal tersebut menjadi salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan anggaran belanja suatu lembaga sektor publik sehingga pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal dapat diberikan (Bastian, 2010). *VFM* harus diaplikasikan dalam mengelola keuangan daerah *VFM* dapat menjembatani Pemerintah Daerah dalam mencapai *Good Governance*.

Prinsip-prinsip *Good Governance* yang diterapkan menjadi harapan untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Pieris dan Nizam (2008) menyatakan pendapat Sembilan prinsip dalam *Good Governance* sebagai berikut (1) visi strategis, (2) akuntabilitas, (3) efisiensi dan efektivitas, (4) responsivitas, (5) orientasi consensus, (6) keadilan dan kewajaran, (7) transparansi, (8) hukum dan aturan, dan (9) partisipasi. Pada penelitian kali ini penulis hanya mengambil 3 prinsip dari *Good Governance* karena masih terdapat penelitian-penelitian sebelumnya yang tidak konsisten. Prinsip yang diambil antara lain akuntabilitas, transparansi dan partisipasi anggaran. Penulis ingin menguji kembali pengaruh dari prinsip-prinsip tersebut pada kinerja *VFM* pada Pemerintah Kabupaten Enrekang. Adapun tujuan penelitian ini antara lain untuk menguji adanya pengaruh akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi anggaran terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian ini mampu memberikan manfaat untuk memperkuat bukti empirik. Penelitian ini mampu menambah pengetahuan untuk mendalami teori-teori sehubungan dengan teori keagenan,

teori prospek dan teori penetapan tujuan khususnya mengenai akuntabilitas, transparansi dan partisipasi anggaran.

Penelitian ini mampu memberikan sumbangan praktis dalam membangun kinerja pemerintah, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi anggaran di Pemerintah Enrekang, sehingga nantinya diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran untuk Pemerintah Enrekang dalam menentukan kebijakan. Teori keagenan, teori prospek dan teori penetapan tujuan digunakan dalam penelitian ini.

Teori keagenan adalah suatu konsep yang memberikan penjelasan tentang adanya prinsipal dimana prinsipal tersebut memilih orang lainnya menjadi agen untuk melaksanakan tugas demi kemakmuran prinsipal yang mana juga termasuk melakukan delegasi kewenangan pengambilan keputusan (Jensen dan Meckling, 1976). Adapun asumsi yang muncul di antaranya : (1) informasi dianggap produk komoditas yang diperjualbelikan, (2) permasalahan antar anggota organisasi, asimetri informasi dan efisiensi antara agen dan prinsipal, (3) kemampuan nalar terhadap masa mendatang, dan adanya kecenderungan untuk menjauhi risiko, dan (4) karakter manusia memiliki kecenderungan mendahulukan dirinya sendiri, terbatasnya rasionalitas (Eisenhard, 1989).

Kahnerman dan Tversky (1979) mengembangkan *prospect theory* yang memberikan gambaran bagaimana individu dalam mengevaluasi risiko maupun potensi adanya kerugian dan keuntungan. Keputusan untuk menyetujui dan memberi dukungan maupun berperan secara aktif akan diambil dengan

pertimbangan apakah hasil yang diperoleh lebih memberikan keuntungan atau kerugian.

Teori penetapan tujuan ialah teori bahwa seseorang mempunyai keperluan yang dapat yang ia nilai dan pikirkan sebagai suatu dampak tertentu ataupun sasaran yang diinginkan untuk tercapai (Locke dan Latham, 1990). Di dalam penelitian ini, teori ini digunakan untuk menjelaskan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkannya. Hal ini akan menjadi penentu sebesar apa usaha yang hendak dilakukannya, apabila semakin tinggi komitmen seorang individu maka dorongan individu dalam mengusahakan akan lebih keras.

Umumnya, pengelolaan anggaran memiliki keterkaitan dengan akuntabilitas. Ini terlihat dari akuntabilitas sebagai hal yang penting sebagai penjamin efektivitas dan efisiensi. Secara tradisonal, akuntabilitas telah dikaitkan dengan pemanggaan seorang individu untuk menjelaskan atas tindakan mereka kepada beberapa otoritas yang lebih tinggi, dengan penekanan pada pengawasan eksternal

Dan ancaman sanksi potesial. Agen dan prinsipal, diman agen bertanggung jawab prinsipal untuk tindakannya. Identita prinsipal mempengaruhi arah di mana akuntabilitas dilaksanakan mungkin ke atas (ke otoritas yang lebih tinggi), ke bawah (ke warga atau masyarakat), atau ke samping (sebagai bagian kontrak yang telah disepakati untuk saling menguntungkan). Sinclair (1955) mendefinisikan akuntabilitas publik sebagai kemampuan memberikan tanggungjawab secara langsung kepada masyarakat,

hal menunjukkan bahwa peran prinsipal lebih sesuai apabila dikaitkan dengan masyarakat umum.

Seperti disebutkan sebelumnya, akuntabilitas sering dilihat sebagai prasyarat untuk pemerintahan yang baik. Bovens (2007) memberikan lima alasan untuk mekanisme akuntabilitas publik, termasuk kebutuhan untuk memastikan control demokratis dari lembaga-lembaga publik, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan untuk meningkatkan kepercayaan publik dalam pengaturan pemerintahan. Namun, meskipun ada sedikit keraguan bahwa ini adalah tujuan berharga, Bovens menjelaskan bahwa control yang lebih tidak selalu diinginkan atau menyebabkan pemerintahan yang lebih baik, pemantauan dan aturan dapat menghambat pengambilan keputusan dan memiliki dampak negatif pada operasional yang berlebihan kinerjanya. Dengan kata lain, biaya prosedur akuntabilitas operasi dan sistem mungkin lebih besar daripada manfaat potensial bahwa mereka mungkin memberikan, dan akuntabilitas tidak harus dikejar sendiri. Beberapa kritikus mengambil ide ini lebih lanjut dengan mengklarifikasi sarana dimaksud dan tujuan akuntabilitas ketika diterapkan untuk input, proses dan hasil. Misalnya, dengan fokus terutama pada apa yang mereka klarifikasi sebagai sarana disebut 'kinerja', yang bertujuan untuk menerjemahkan ke dalam akhir 'keadilan' atau 'keadilan', mereka menemukan bahwa ada sedikit bukti yang menunjukkan bahwa protokol akuntabilitas adalah tujuan mereka.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi**

dan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dipaparkan dalam latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang.
2. Apakah pengaruh transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang.
3. Apakah pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang.
4. Apakah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menguji pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang.
2. Menguji pengaruh transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang.
3. Menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang.

4. Menguji akuntabilitas, transparansi dan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan serta tambahan bukti empiris di bidang ekonomi manajemen terutama manajemen keuangan daerah mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi anggaran terhadap pemerintah Kabupaten Enrekang.

2. Manfaat Praktis

2.1 Bagi pemerintah daerah, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukkan dalam merumuskan kebijakan pemerintahan daerah yang bertatakelola yang baik (Good Governance) yang dapat meningkatkan kinerja pemerintahan.

2.2 Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan tambahan informasi untuk penelitian selanjutnya.

E. Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2011). Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran,

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara berbagai fenomena yang diselidiki.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-asosiatif dengan pendekatan kuantitatif yang menunjukkan pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi anggaran terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang dipilih dalam pendekatan desain penelitian.



BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Deskripsi Teori

Good Governance (tata cara pemerintahan) merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Model-model penyelenggaraan pemerintahan yang sebelumnya adalah dianggap kurang sesuai lagi terhadap perubahan tatanan masyarakat pemerintahan pada saat ini. Karenanya, tuntutan *good governance* merupakan hal yang wajar dan seharusnya direspon oleh semua kalangan dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah agar terealisasi peningkatan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan *good governance* diharapkan pemerintah semakin peduli terhadap kepentingan warga masyarakatnya (Dwiyanto, 2005).

Mardiasmo (2009) mengemukakan bahwa adanya tuntutan reformasi sektor publik diharapkan agar dapat terbentuk organisasi sektor publik yang ekonomis, transparan, efektif, responsive serta memiliki akuntabilitas yang tinggi, sehingga untuk menciptakan tata kelola yang baik *good governance*. Hal ini juga merupakan upaya untuk menyelenggarakan manajemen pembangunan yang baik serta bertanggungjawab sejalan dengan prinsip demokrasi, efisien, pencegahan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), baik secara politik maupun administrasi.

Menurut UNDP (dalam LAN dan BPKP, 2000) mengemukakan prinsip-prinsip/karakteristik *good governance* di antaranya adalah transparansi,

akuntabilitas dan partisipasi anggaran, dengan melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* tentu akan berpengaruh pada kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Hal ini dapat diberikan kesimpulan apabila pelaksanaan *good governance* ditingkatkan maka otomatis dapat meningkatkan kinerja organisasi itu sendiri (Mulyawan, 2009).

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *accountability* yang diartikan sebagai “yang dapat dipertanggungjawabkan”, atau dalam kata sifat disebut dengan *accountable*. Banyak yang mengidentikan istilah *accountability* dan *responsibility*, secara umum *responsibility* (responibilitas) adalah tanggung jawab yang diberikan pimpinan kepada bawahan untuk melaksanakan suatu tugas kewajibannya. Kohler (dalam woluyo, 2007) mengemukakan bahwa responibilitas adalah *acceptance of assigned authority* atau penerimaan atas penyerahan tugas atau tanggungjawab, kongkritnya penerimaan tugas atau tanggung jawab yang dilaksanakan oleh bawahan dari pimpinan dengan segala pertanggungjawabannya.

Sedangkan dalam pengertian luas, akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak tersebut.

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dari konsep *good governance*, yaitu sebuah konsep tata kelola yang baik, diadopsi oleh berbagai Negara berkembang di dunia. Rasul (2002) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. Sedangkan Annisningrum (2010) mengemukakan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercaya kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Kedua penjelasan tersebut menyimpulkan bahwa akuntabilitas menekankan pada pertanggungjawaban dari suatu pelaksanaan kebijakan yang dilakukan secara periodik kepada masyarakat dan otoritas yang lebih tinggi.

LAN RI dan BPKP (2000) dan Stanbury (dalam Ismiarti, 2013) mengartikan bahwa akuntabilitas sebagai kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good governance* adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan atas hasil keputusan yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi, baik terhadap administrasi, keuangan serta program yang berkaitan dengan visi dan misi organisasi yang berdasarkan pada

kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Dalam konteks organisasi, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas finansial dari pemerintah maupun organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan tersebut.

Fungsi akuntabilitas lebih menekankan pada pelaksanaan pertanggungjawaban dari lembaga-lembaga yang diberi mandate untuk melaksanakan program-program tertentu. Prinsip akuntabilitas merupakan salah satu ciri-ciri pemerintahan yang baik (*good governance*), dimana semua pihak (baik pemerintah, swasta dan masyarakat) harus mampu memberikan pertanggungjawaban atas mandate yang diberikan kepadanya. Secara umum, organisasi atau institusi harus akuntabel kepada mereka yang terpengaruh dengan keputusan atau aktivitas yang mereka lakukan.

Dikemukakan oleh Krina (2003) dan Mardiasmo (2009) bahwa akuntabilitas adalah prinsip yang menjamin setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan atas setiap aktivitas yang dilakukan. Sedangkan prinsip-prinsip akuntabilitas, seperti dikutip dari Modul Sosialisasi Sistem Akip (LAN dan BPKP, 2000) adalah sebagai berikut :

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.

- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- e. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Prinsip-prinsip di atas menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah segala kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan baik berupa keberhasilan maupun kegagalan program kegiatan secara terbuka, konsisten, komitmen, jujur, objektif dan inovatif dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain prinsip-prinsip akuntabilitas, dalam pelaksanaannya juga dikenal bentuk-bentuk akuntabilitas, seperti yang dijelaskan oleh YPAPI (2004) bahwa bentuk dari akuntabilitas, yaitu :

1. Akuntabilitas ke atas (*upward accountability*), menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan dari pimpinan puncak dalam bagian tertentu kepada pimpinan eksekutif, seperti seorang dirjen kepada menteri.

2. Akuntabilitas keluar (*outward accountability*), bahwa tugas pimpinan untuk melaporkan, mengkonsultasikan dan menanggapi kelompok-kelompok klien dan *stakeholders* dalam masyarakat.
3. Akuntabilitas ke bawah (*downward accountability*), menunjukkan bahwa setiap pimpinan dalam berbagai tingkatan harus selalu mengkomunikasikan dan mensosialisasikan berbagai kebijakan kepada bawahannya karena sebegus apapun suatu kebijakan hanya akan berhasil manakala dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai.

Selanjutnya Mardiasmo (2009) dan Tuner and Hulme (1997) menyatakan bahwa akuntabilitas terdiri atas dua macam, yaitu akuntabilitas vertical (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*).

Pelaksanaan pertanggungjawaban baik secara vertical maupun horizontal juga harus memperhatikan bentuk-bentuk akuntabilitasnya, Krina (2003) menjelaskan beberapa bentuk akuntabilitasnya di antaranya adalah.

1. Keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.
2. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku.
3. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku.

4. Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.
5. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal.
6. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
7. Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.

Bentuk akuntabilitas di atas menjelaskan bahwa segala hasil kegiatan harus dipertanggungjawabkan dengan cara melaporkan, mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kepada semua pihak, termasuk menanggapi hal-hal yang layak untuk ditindaklanjuti apabila ada pihak yang kurang puas terhadap kinerja yang telah diberi mandat untuk melaksanakan programnya. Akuntabilitas publik yang dilakukan oleh organisasi sektor publik harus memenuhi beberapa dimensi, menurut Mardiasmo (2006) dan Mahmudi (2011) yang mengutip dari Hoqwood dan Tomkins (1984) dan Elwood (1993), yaitu:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (*law enforcement*),

sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktik dan maladministrasi.

2. Akuntabilitas Manajerial

Adalah pertanggungjawaban manajer dari lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif. Akuntabilitas ini dapat juga disebut akuntabilitas kinerja. Inefisiensi publik menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan.

3. Akuntabilitas Program

akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang hendak mendukung strategi dan pencapaian misi, visi dan tujuan organisasi.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholder*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial lebih menitikberatkan pada ukuran anggaran dan finansial. Pengelolaan keuangan publik sangat penting karena menjadi perhatian utama di masyarakat.

Prinsip akuntabilitas/pertanggungjawaban kepada publik harus digunakan untuk menciptakan sistem control yang efektif pada pelayanan publik dan penyampaian secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini harus juga dilakukan oleh pelaku yang diberi mandate dalam melaksanakan setiap program yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pelaksana program pemerintah.

2. Transparansi

Pemerintah yang bersih (*Good Government*) adalah salah satu tujuan atau ekspektasi dari *Good Governance*, selain pelaksanaan prinsip akuntabilitas juga yang tidak kalah pentingnya adalah penerapan prinsip keterbukaan atau yang dinamakan transparansi. Mardiasmo (2004) menjelaskan bahwa transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya public kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi, termasuk informasi tentang keuangan serta informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pentingnya prinsip transparansi lebih dikuatkan melalui UU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), di dalamnya menjelaskan azas keterbukaan (transparansi) pada penyelenggaraan pemerintah daerah, azas untuk

membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

Menurut Pan Suk Min (2007) dalam jurnal Komarudin dan Satmoko (2009) adalah sebagai berikut:

“Transparency is “free from pretense or deceit, easily detected or seen through, or readily understood.” Why is transparency important? Transparency is essential for democratic decision-making. Citizens must have access to information so that they may participate meaningfully in decision process and make informed choices.”

Menurut UNDP (dalam Mardiasmo, 2009) transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan. Krina (2003) mengemukakan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Prinsip transparansi pelayanan publik, pelaksana harus terbuka pada setiap tindakannya, siap menerima kritikan maupun masukan, serta dapat dipertanggungjawabkan, dan hal ini dapat dijelaskan pada karakteristik transparansi yang harus diperhatikan adalah:

1. Informativeness (informatif).

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat;

2. Openess (keterbukaan).

Keterbukaan Informasi Publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain dari informasi yang dikecualikan yang diatur oleh Undang-Undang;

3. Disclosure (pengungkapan).

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders) atas aktivitas dan kinerja finansial. Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas.

Satu perspektif menyatakan bahwa transparansi adalah hak manusia, karena dapat membantu melindungi terhadap pemerintah yang berperilaku menindas atau tidak efisien. Memang, transparansi dapat meningkatkan kinerja dalam konteks tertentu. Namun, Heald (2007) berpendapat bahwa kita tidak harus menganggap setiap nilai intrinsic dengan gagasan transparansi dalam pemerintahan. Meskipun demikian,

transparansi tidak selalu meningkatkan kinerja, karena dapat mengakibatkan organisasi mengambil pendekatan *box-ticking* untuk penerbitan volume besar data mentah daripada informasi yang berarti. Jika data ini tidak dimasukkan ke dalam konteks yang sesuai dengan prinsipal, atau tidak dapat dimengerti oleh prinsipal dengan mudah, data menjadi tidak berarti dan agen mungkin dinilai kurang bertanggung jawab.

Dalam konteks pengeluaran publik, Heald (2007) menunjukkan transparansi memiliki lima atribut. Pertama, transparansi ditemukan dalam rilis informasi, tanpa praktek manipulatif dapat merusak. Kedua, pengguna dapat menelusuri detail organisasi yang relevan, hal itu perlu dilakukan secara komprehensif dan didirikan di atas hirarki dirancang dengan baik dokumen pelaporan. Ketiga, masalah kapasitas dan insentif politik penataan harus terkait erat. Keempat, adalah penting untuk memiliki kapasitas pengawasan independen di luar pelaksana. Kelima, peran audit publik sangat penting untuk transparansi yang efektif, baik untuk memvalidasi pelaporan keuangan (sesuai audit sektor swasta) dan kekuasaannya lebih luas dari keteraturan (perjanjian pengeluaran dengan otorisasi), kepatutan (tidak adanya penipuan dan korupsi) dan kinerja (pencapaian nilai uang).

3. Partisipasi Penyusunan Anggaran

Partisipasi adalah suatu perilaku dan aktivitas yang dilakukan oleh aparat pemerintah selama aktivitas penyusunan anggaran berlangsung menurut Brownell (1986). Partisipasi penyusunan anggaran dilakukan dengan tujuan agar anggaran yang ditetapkan nantinya bisa sesuai dengan keadaan yang terjadi. Partisipasi penyusunan anggaran merupakan ciri dari penyusunan anggaran yang menekankan kepada partisipasi aparat pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan proses penyusunan anggaran.

Partisipasi anggaran adalah keikutsertaan individu dalam menyusun anggaran sebagai proses pengambilan keputusan yang bermanfaat untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Brownell (1982) partisipasi anggaran merupakan suatu proses yang melibatkan individu-individu secara langsung didalamnya dan mempunyai pengaruh terhadap penyusunan tujuan anggaran yang prestasinya akan dinilai dan kemungkinan akan dihargai atas dasar pencapaian tujuan anggaran.

Anggaran disusun untuk membantu manajemen mengkomunikasikan tujuan organisasi pada semua manajer dalam organisasi dibawahnya, untuk mengkoordinasikan kegiatan, alat pengawasan pelaksanaan kegiatan, dan mengevaluasi prestasi para manajer tersebut. Agar tujuan tersebut dapat dicapai, penyusunan anggaran tidak boleh hanya dilakukan oleh manajemen puncak saja tetapi harus didukung peran serta dari manajer tingkat menengah dan bawah sesuai dengan kompetensinya masing-masing (Supriyono, 1987) dalam Mariam (2009).

Menurut Mulyadi (2001) partisipasi dalam penyusunan anggaran berarti keikutsertaan operating manager dalam merumuskan bersama dengan komite anggaran mengenai rangkaian kegiatan dimasa yang akan datang yang akan ditempuh oleh operating manager yang bersangkutan dalam pencapaian sasaran anggaran. Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggaran sebagai suatu proses dalam organisasi yang melibatkan para manajer dalam penentuan tujuan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya atau penyusunan anggaran yang memungkinkan bawahan untuk bekerja sama menentukan rencana.

Partisipasi suatu tingkat manajer atau manajer publik mulai dari proses penyusunan anggaran akan membawa pengaruh positif dalam pencapaian tujuan suatu perusahaan atau pemerintahan. Menurut Mulyadi (2001) tingkat partisipasi operating manager dalam penyusunan anggaran mendorong moral kerja yang tinggi merupakan kepuasan seseorang terhadap pekerjaan, atasan dan rekan sekerjanya. Moral kerja ditentukan oleh seberapa besar seseorang mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari organisasi.

Dalam proses penyusunan anggaran, anggaran pemerintah memiliki sebuah siklus seperti berikut Deddi (2007):

1) Penyusunan Rencana Anggaran

Tahap penyusunan anggaran adalah tahapan pertama dari proses penganggaran. Pada tahapan ini biasanya rencana anggaran disusun oleh pihak eksekutif yang nantinya akan melaksanakan anggaran tersebut. Anggaran yang disusun dalam tahapan ini dimaksudkan untuk dilaksanakan dalam periode anggaran berikutnya. Oleh sebab itu, jadwal waktu yang akan disediakan untuk penyusunan anggaran harus dibuat sedemikian rupa sehingga anggaran diperkirakan akan siap dilaksanakan sebelum periode anggaran berikutnya dimulai.

2) Persetujuan Legislatif

Anggaran diajukan ke lembaga legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Dalam hal ini lembaga legislatif (terutama komite anggaran) akan mengadakan pembahasan guna memperoleh pertimbangan-pertimbangan untuk menyetujui atau menolak anggaran tersebut. Selain itu, akan diadakan juga dengar pendapat sebelum nantinya lembaga legislatif menyetujui atau menolaknya.

3) Pelaksanaan Anggaran

Pada tahapan ini anggaran yang telah disetujui pada tahapan sebelumnya mulai dilaksanakan oleh pihak eksekutif organisasi atau pelaksana anggaran lainnya. Dalam melaksanakan anggaran diperlukan juga sikap kehati-hatian agar organisasi tidak begitu saja dilaksanakan seluruh anggaran belanja kegiatan pada awal-awal tahun anggaran meskipun hal tersebut telah disetujui sebelumnya. Dengan kata lain organisasi harus memperhatikan arus keluar dan masuknya sumber daya

dalam pelaksanaan anggaran apabila tidak ingin menghadapi kesulitan pemenuhan kewajiban untuk membiayai kegiatannya.

4) Pelaporan dan Audit

Pada tahap ini, realisasi anggaran akan dilaporkan dan diperbandingkan secara periodic dengan anggaran yang telah disetujui sebelumnya. Adanya perbedaan antara anggaran dan realisasinya harus dijelaskan penyebabnya. Laporan tersebut kemudian diaudit untuk memastikan bahwa laporan telah dibuat secara benar. Laporan anggaran dan hasil audit atas laporan tersebut merupakan bahan informasi dalam penyusunan anggaran untuk periode anggaran berikutnya. Oleh sebab itu, rangkaian proses penganggaran yang dimulai sejak tahap penyusunan hingga pelapora dan audit anggaran pada akhirnya akan membentuk suatu siklus anggaran.

Partisipasi dalam penyusunan anggaran dapat mempengaruhi sikap, usaha pencapaian anggaran, dan kinerja manajerial dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Pemberian kesempatan untuk mengembangkan dan menerapkan pengetahuan dan kemampuannya.
- b. Penyusunan anggaran dapat disesuaikan dengan kemampuan pimpinan yang bersangkutan.
- c. Anggaran yang disusun tersebut mudah dipahami oleh pimpinan.

d. Pimpinan tersebut merasa bahwa anggaran yang disusun merupakan milik mereka sehingga mereka berusaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

e. Menerima anggaran yang telah disusun sebagai dasar pengukuran kinerja.

4. Kinerja Keuangan Pemerintah

Pemerintahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dalam perundangan tersebut diatur mengenai pelaksanaan Otonomi Daerah yang tepat, maka diperlukan pengukuran kinerja yang berdasar pada pelaksanaan pemerintahan dalam otonomi daerah tersebut.

Atmosudirjo (dalam Haryanto, 2009), kinerja dapat dijelaskan sebagai suatu kajian tentang kemampuan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan. Penilaian kinerja dapat dipakai untuk mengukur kegiatan-kegiatan organisasi dalam pencapaian tujuan dan juga sebagai bahan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja organisasi merupakan suatu prestasi kerja dalam proses penyelenggaraan untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Perkiraan jumlah alokasi dana untuk setiap unit kerja pemerintahan daerah dan program kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu tingkat pelayanan publik, disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan

masyarakat, sehingga identifikasi input, teknik produksi pelayanan publik dan tingkat kualitas minimal yang harus dihasilkan oleh suatu unit kerja menjadi syarat dalam menentukan alokasi dana yang optimal untuk setiap unit kerja pelayanan publik. Dengan demikian pengeluaran pemerintah daerah dapat menciptakan ukuran kinerja yang akan mempermudah dalam melakukan kegiatan pengendalian dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah.

Anggaran daerah merupakan disain teknis untuk pelaksanaan strategi, sehingga apabila pengeluaran pemerintah mempunyai kualitas yang rendah, maka kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah juga cenderung melemah yang berakibat pada wujud daerah dan pemerintah daerah di masa yang akan datang sulit untuk dicapai. Dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah, salah satu aspek penting adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk itu diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien dan efektif.

Keban (2004) menjelaskan bahwa penilaian kinerja yg efektif adalah penilaian yang telah menggunakan prinsip-prinsip penilaian dan secara tepat menilai apa yang seharusnya dinilai. Penilaian kinerja juga berkaitan dengan kinerja organisasi, seperti dijelaskan oleh Gaspersz (2003) bahwa pengukuran fakta-fakta akan menghasilkan data, apabila dianalisis secara tepat.

Berbagai pengertian penilaian kinerja telah dikemukakan para ahli tersebut di atas, maka dalam tulisan ini dapat dikemukakan bahwa penilaian kinerja secara komprehensif mencakup penilaian secara formal dan sistematis dengan dimensi hasil, perilaku, pelaku, dan sifat personalitas, yang didasarkan pada deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan serta visi, misi dan tujuan organisasi yang bertujuan memperbaiki kinerja individu, kinerja organisasi dan kinerja proses. Penilaian kinerja juga membandingkan data dari yang direncanakan dengan hasil yang dicapai, apabila komparansi ini didapatkan bahwa hasil kerja sesuai dengan yang direncanakan, maka tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai.

Peran pemerintah daerah tidak lagi merupakan alat kepentingan pemerintah pusat, melainkan alat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. Konsep *Value For Money* (VFM) penting bagi pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat, karena implementasinya akan memberikan manfaat seperti:

1. Efektifitas pelayanan public, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan public.
3. Biaya pelayanan yang murah, karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan *resources*.
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan public.
5. Meningkatkan *public cost awareness* sebagai akar pelaksanaan pertanggungjawaban public.

Dalam konteks otonomi daerah, VFM merupakan jembatan untuk mengantarkan Pemerintah Daerah mencapai *good governance*, yaitu pemerintah daerah yang transparan, ekonomis, efisiensi, efektif, responsive, dan akuntabel. VFM tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Langkah-langkah dalam pengukuran VFM atas pengeluaran daerah dapat dirinci menurut indikatornya sebagai berikut:

1. Pengukuran ekonomi

Mardiasmo (2001) mengemukakan ekonomi merupakan ukuran relative, dalam suatu organisasi pemerintah daerah. Pertanyaan yang timbul sehubungan dengan ukuran ekonomi ini adalah “apakah pengeluaran (belanja) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah lebih besar daripada yang sesungguhnya diperlukan oleh organisasi itu?”. “apakah pengeluaran (belanja) organisasi lebih besar dari pada organisasi lainnya yang sejenis (yang dapat dibandingkan)?”.

2. Pengukuran efisiensi

Efisiensi dapat diukur dengan rasio antara *output*/ keluaran atau *input* masukan sekunder (pengeluaran). Semakin besar output yang dihasilkan dibandingkan dengan pengeluaran yang dilakukan, maka semakin efisien suatu organisasi. Rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolut tetapi dalam bentuk relative. Karena efisiensi diukur lewat perbandingan keluaran dan masukan.

3. Pengukuran efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan berapa besar pengeluaran yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Pengeluaran boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan.

Efektivitas merupakan perbandingan antara outcome dengan output (keluaran). Kinerja merupakan perilaku kerja yang ditampakkan oleh orang – orang yang terlihat dalam suatu perusahaan dan dapat dijelaskan melalui sistem evaluasi kinerja. Kinerja perusahaan merupakan indikator tingkatan prestasi yang dapat dicapai dan mencerminkan kebersihan manajer. Jadi kinerja perusahaan merupakan hasil yang diinginkan perusahaan dari perilaku orang-orang didalamnya.

Sementara Mahsun (2009) mendefinisikan kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Dengan mengadopsi pendapat Mahsun diatas, kinerja pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi pemerintah daerah yang tertuang dalam *strategic planning*. Mahsun (2009) menyebutkan bahwa indikator kinerja pemerintah meliputi indikator masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Sementara Palmer dalam Mahsun (2009) menyebutkan bahwa indikator kinerja antara lain : (1) indikator biaya; (2) indikator produktivitas; (3) tingkat penggunaan; (4) target waktu; (5) volume pelayanan; (6) kebutuhan pelanggan; (7) indikator kualitas pelayanan; (8) indikator kualitas pelanggan dan (9) indikator pencapaian tujuan.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi anggaran terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Enrekang, yaitu :

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1	Binti Sa'dah (2015)	Akuntabilitas dan Tranparansi Anggaran melalui E-Government	Akuntabilitas, transparansi dan anggaran	Akuntabilitas dan transparansi anggaran sudah dilakukan dengan baik namun tertutupnya penganggaran yang dilakukan oleh TAPD dan Badan Anggaran rawan terjadi penyimpangan.
2	Firdiansyah (2015)	Akuntabilitas, transparansi dan anggaran berbasis kinerja pada satuan	Akuntabilitas, transparansi, dan anggaran	Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif pada anggaran

		kerja perangkat daerah kota Denpasar		berbasis kinerja.
3	Rido (2015)	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Jember	Transparansi dan akuntabilitas	Akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten jember dengan arah positif
4	Irna (2016)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap kinerja anggaran dengan konsep value for money pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta.	Transparansi, akuntabilitas dan pengawasan	Transparansi, akuntabilitas dan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran
5	Desak (2014)	Pengaruh Akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial satuan kerja	Akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi anggaran	Akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja

Sumber : data diolah, 2018.

Dari table 2.1 dapat dilihat bahwa terdapat kesamaan hasil penelitian yang dilakukan oleh kelima peneliti terdahulu, namun belum ada yang mengambil variable akuntabilitas, transparansi dan partisipasi anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehingga mendorong penulis untuk mengambil variable akuntabilitas, transparansi dan partisipasi anggaran terhadap kinerja pemerintah.

C. Kerangka Pikir

Menurut Riduwan (2004) kerangka berpikir adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan telaah penelitian. Kerangka pikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian.

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Indikatornya yaitu kepatuhan terhadap hukum, mempertanggungjawabkan yang telah dibuat dan memberikan hasil yang maksimal.

Transparansi menurut Krina (2003) yang menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses dan pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapai. Indikatornya adalah penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab,

kemudahan akses informasi, dan meningkatkan arus informasi melalui kejasama dengan media dan lembaga non pemerintah.

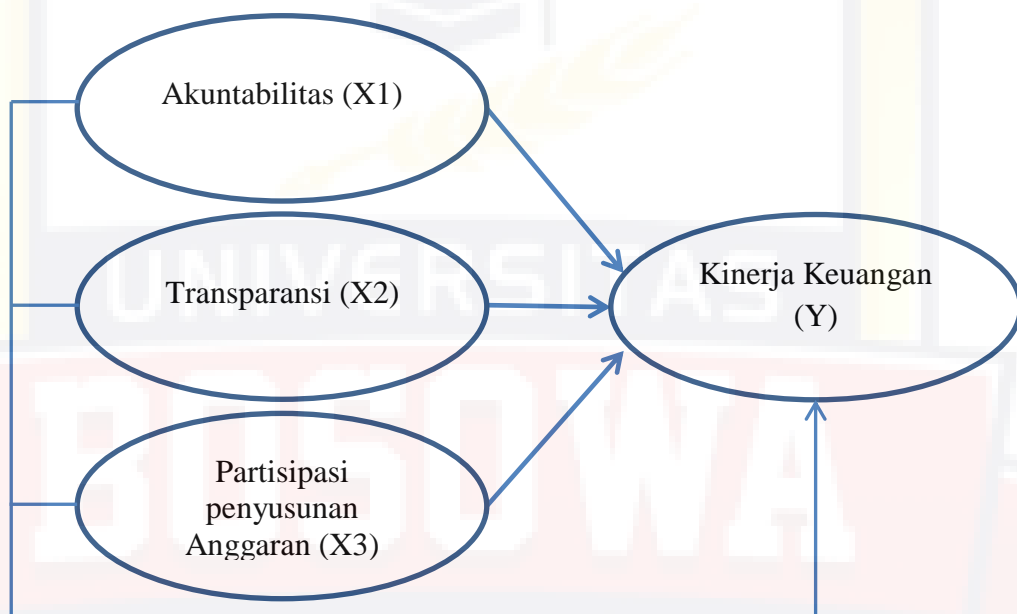
Menurut Brownell (1982) Partisipasi penyusunan anggaran dilakukan dengan tujuan agar anggaran yang ditetapkan nantinya bisa sesuai dengan keadaan yang terjadi. Partisipasi penyusunan anggaran merupakan ciri dari penyusunan anggaran yang menekankan kepada partisipasi aparat pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan proses penyusunan anggaran. Indikatornya yaitu keikutsertaan penyusunan anggaran, besarnya pengaruh terhadap penetapan anggaran, dan kebutuhan memberikan pendapat.

Atmosudirjo (dalam Haryanto, 2009), kinerja dapat dijelaskan sebagai suatu kajian tentang kemampuan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan. Penilaian kinerja dapat dipakai untuk mengukur kegiatan-kegiatan organisasidalam pencapaian tujuan dan juga sebagai bahan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja organisasi merupakan suatu prestasi kerja dalam proses penyelenggaraan untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Sementara Mahsun (2009) mendefinisikan kinerja (*performance* adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Dengan mengadopsi pendapat Mahsun diatas, kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi Pemerintah Daerah yang

tertuang dalam *strategic planning*. Mahsun (2009) menyebutkan bahwa indikator kinerja pemerintah meliputi indikator masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : data diolah, 2018

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran

D. Hipotesis

1. Apakah pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang ?

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dari konsep *good governace*, yaitu sebuah konsep tata kelola yang baik, diadopsi oleh

berbagai Negara berkembang di dunia. Rasul (2002) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. Sedangkan Annisaningrum (2010) mengemukakan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercaya kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Kedua penjelasan tersebut menyimpulkan bahwa akuntabilitas menekankan pada pertanggungjawaban dari suatu pelaksanaan kebijakan yang dilakukan secara periodik kepada masyarakat dan otoritas yang lebih tinggi.

Hasil penelitian Rido (2015) mengungkapkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari penjelasan tersebut, bahwa semakin tinggi otoritas pertanggungjawaban suatu Pemerintahan maka semakin baik pula tata kelola pemerintahannya (*good governance*).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah

2. Apakah pengaruh transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang ?

Pemerintah yang bersih (*Good Government*) adalah salah satu tujuan atau ekspektasi dari *Good Governance*, selain pelaksanaan prinsip akuntabilitas juga yang tidak kalah pentingnya adalah penerapan prinsip keterbukaan atau yang dinamakan transparansi. Mardiasmo (2004) menjelaskan bahwa transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya public kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi, termasuk informasi tentang keuangan serta informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Hasil penelitian Irna (2016), Rido (2015) mengungkapkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Satu perspektif menyatakan bahwa transparansi adalah hak manusia, karena dapat membantu melindungi terhadap pemerintah yang berperilaku menindas atau tidak efisien.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah

3. Apakah pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang ?

Partispasi anggaran adalah keikutsertaan individu dalam menyusun anggaran sebagai proses pengambilan keputusan yang bermanfaat untuk

mencapai tujuan organisasi. Menurut Brownell (1982) partisipasi anggaran merupakan suatu proses yang melibatkan individu-individu secara langsung didalamnya dan mempunyai pengaruh terhadap penyusunan tujuan anggaran yang prestasinya akan dinilai dan kemungkinan akan dihargai atas dasar pencapaian tujuan anggaran.

Hasil penelitian Desak (2014), mengungkapkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SKPD. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah

4. Apakah pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang ?

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dari konsep *good governace*, yaitu sebuah konsep tata kelola yang baik, diadopsi oleh berbagai Negara berkembang di dunia. Rasul (2002) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.

Selain itu, pemerintah dan organisasi publik harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang program yang diselenggarakan pemerintah

dari awal hingga akhir penyelesaiannya. Sebagai warganegara, prinsip transparansi adalah kebebasan seseorang untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan terbuka tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan publik/umum dari pemerintah maupun organisasi sektor publik.

Partisipasi anggaran adalah keikutsertaan individu dalam menyusun anggaran sebagai proses pengambilan keputusan yang bermanfaat untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Brownell (1982) partisipasi anggaran merupakan suatu proses yang melibatkan individu-individu secara langsung didalamnya dan mempunyai pengaruh terhadap penyusunan tujuan anggaran yang prestasinya akan dinilai dan kemungkinan akan dihargai atas dasar pencapaian tujuan anggaran.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif (*Quantitative Approach*), yakni suatu pendekatan yang menekankan pada pengujian teori-teori atau konsep melalui pengukuran variabel dan melakukan prosedur analisis data dengan peralatan statistik serta bertujuan untuk menguji hipotesis.

Berdasarkan jenisnya :

1. Penelitian kuantitatif deskriptif

Penelitian kuantitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau meringkaskan berbagai kondisi, situasi, fenomena atau variable penelitian menurut kejadian sebagaimana adanya yang dapat dipotret, diwawancara atau diobservasi serta yang dapat diungkapkan melalui bahan-bahan dokumenter (Burhan Bungin, 2005).

2. Penelitian kuantitatif asosiatif

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif yang merupakan penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variable atau lebih. Jenis penelitian ini mempunyai tingkatan tertinggi dibandingkan dengan deskriptif atau komperatif karena dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan meramalkan dan mengontrol suatu gejala (Sugiyono, 2003).

B. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 bulan yaitu dari bulan Nopember – Desember 2018. Penelitian ini akan dilakukan dengan mengambil objek penelitian di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Enrekang. Pemilihan lokasi ini didasarkan karena data yang diperlukan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini diperoleh oleh peneliti di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang.

C. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Enrekang periode 2018 yang jumlahnya 31 OPD. Sampel penelitian ini dengan menggunakan teknik *random sampling*, dengan sampel sebanyak 124 responden. Adapun responden dalam penelitian ini antara lain Kepala Dinas, Bendahara Pengeluaran, Kasubag Keuangan, dan Kasubag Perencanaan.

Dalam menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus *Slovin* dalam Amirin (2011) yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Ket :

n : Jumlah sampel

N : Jumlah Populasi

e : Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir dalam penelitian ini adalah 0,10

$$n = \frac{124}{1 + 124 (0,10)^2}$$

= 55,35 Dibulatkan menjadi 56

Dengan ukuran populasi (N) sebanyak 124 dan dengan persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir atau diinginkan (e) 0,10 penelitian ini menggunakan 56 sampel (dibulatkan).

D. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut, sikap atau nilai orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2014). Sesuai judul penelitian “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Enrekang, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut .

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas (*independent variable*) atau disebut juga variabel predictor, merupakan variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat dan mempunyai hubungan yang positif atau negatif (Suharso, 2009). Maka dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (*independent variable*) adalah Akuntabilitas (X_1) adalah pertanggungjawaban pemegang jabatan publik atas keputusan dan tindakan yang dibuat untuk masyarakat (Krina, 2003). Transparansi (X_2) adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Juliastuti,

2013). Dan Partisipasi Anggaran (X_3) adalah fungsi informasi melalui mana orang dapat datang untuk berbagi visi pembangunan, membuat pilihan dan mengelola kegiatan, indikatornya adalah sebagai berikut:

1).menginformasikan, 2).konsultasikan, 3).perlibatan, 4).pemberdayaan (Waheduzzaman, 2008).

2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat (*dependent variable*) atau disebut variabel enteria, menjadi perhatian utama (sebagai faktor yang berlaku dalam pengamatan) dan sekaligus sasaran dan penelitian. Melalui analisis terhadap variabel terikat dan menemukan solusi atas pemecahan masalah yang diangkat (ibid :38).

Sesuai masalah yang akan diteliti yang akan menjadi variabel dependent adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang (Y).

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variable yang diteliti dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat sehingga setiap instrumen harus mempunyai skala pengukuran, dengan adanya skala pengukuran maka nilai variable yang diukur dengan instrumen tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka (Sugiyono, 2014).

Instrumen penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa angket atau kuesioner yang dibuat sendiri oleh peneliti. Sugiyono (2014) menyatakan bahwa “instrumen penelitian adalah suatu alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun social yang diamati. Dengan demikian, penggunaan instrumen penelitian yaitu untuk mencari

informasi yang lengkap mengenai suatu masalah, fenomena alam maupun sosial.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan data yang akurat yaitu menggunakan skala *Likert*. Sugiyono (2014) menyatakan bahwa “skala *likert* digunakan untuk mengukur suatu sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis instrumen angket atau kuesioner dengan pemberian skor sebagai berikut :

1. SS : Sangat Setuju diberi skor 5
2. S : Setuju diberi skor 4
3. RG : Ragu-Ragu diberi skor 3
4. TS : Tidak Setuju diberi skor 2
5. STS : Sangat Tidak Setuju diberi skor 1

F. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama (Sarwono, 2006). Data primer berupa pertanyaan dalam bentuk kuesioner yang diberikan kepada responden yang ada di masing-masing OPD.

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia. Data sekunder berupa literatur, artikel, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi anggaran. Data sekunder diperlukan dalam penelitian ini sebagai pendukung penulisan.

Sugiyono (2012) menyatakan bahwa kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab oleh responden. Penelitian ini menggunakan metode survei yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pejabat yang berwenang pada Organisasi Perangkat Daerah pemerintah Kabupaten Enrekang.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan membagikan kuesioner yang akan diisi atau dijawab oleh responden. Kuesioner juga dilengkapi dengan petunjuk pengisian yang sederhana dan jelas untuk membantu responden melakukan pengisian dengan lengkap.

Peneliti juga melakukan metode tinjauan kepustakaan. Metode tinjauan kepustakaan yang dilakukan yaitu dengan mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang sehubungan dengan masalah yang diteliti penulis pada buku-buku, makalah, dan jurnal guna memperoleh landasan teoretis yang memadai untuk melakukan pembahasan.

H. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda, yaitu metode analisis untuk lebih dari satu variabel independen. Penelitian ini menggunakan program pengolahan data yaitu SPSS. Dalam penelitian ini, data dianalisis dengan menggunakan alat analisis yang terdiri dari:

a. Uji instrumen penelitian untuk menguji kualitas data menggunakan dua konsep yaitu:

(i) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sah atau tidaknya kuesioner penelitian. Uji dilakukan dengan membandingkan koefisien r hitung dengan koefisien r tabel. Apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel maka mengindikasikan item tersebut valid. Sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r tabel maka item penelitian tersebut tidak valid untuk digunakan.

Uji validitas adalah sejauh mana kecermatan atau ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Dengan kata lain bahwa suatu tes atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas tinggi apabila alat menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut, untuk mengukur validitas instrumen dalam penelitian ini digunakan rumus *Corelasi Product Moment* dari *Pearson* (Sugiyono, 2012) dengan rumus sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n\sum x^2 - (\sum x)^2\}\{n\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

r_{xy} : koefisien korelasi antara skor total

$\sum X$: skor total X

$\sum Y$: skor total Y

$\sum X^2$: jumlah kuadrat skor X

$\sum Y^2$: jumlah kuadrat skor Y

$\sum XY$: jumlah X dan Y

n : jumlah sampel

Sugiyono (2012), instrumen dikatakan valid jika nilai koefisien korelasi skor butir dengan skor total $r > 0,05$, sebaliknya tidak valid jika nilai koefisien korelasi skor butir dengan skor total $r < 0,05$.

(ii) Uji Reabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian ini dilakukan dengan menghitung koefisien *Cronbach Alpha* (α) dari masing-masing instrumen dalam satu variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika memberikan nilai *cronbach's alpha* di atas 0,6 begitu pula sebaliknya.

Suatu instrumen juga harus *reliable* (handal), instrumen dikatakan *reliable* apabila alat tersebut dapat memberikan hasil ukur yang konsisten jika dilakukan oleh seseorang beberapa kali. Dengan kata lain reliabilitas menunjukkan sejauh mana pengukuran dapat memberikan suatu hasil yang tidak berbeda jika dilakukan pengukuran beberapa kali baik oleh satu orang maupun oleh beberapa orang.

Untuk menguji reabilitas (kehandalan) instrumen digunakan rumus *Alfa Cronbach* (Sugiyono, 2012) dengan rumus :

$$r_{ii} = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[\frac{\sum s_i^2}{\sum s_t^2} \right]$$

Keterangan :

r_{ii} : realibilitas instrumen

k : Banyaknya butir pertanyaan

$\sum s_i^2$: jumlah varians butir

$\sum s_t^2$: varians total

Dalam penelitian akan dilakukan uji reabilitas dengan menggunakan nilai *Alpha Cronbach* yaitu suatu instrumen dikatakan reliable apabila nilai *Alpha Cronbach* $> 0,60$ (Sugiyono, 2012).

b. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui, menguji serta memastikan kelayakan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

Variabel tersebut berdistribusi normal, bebas multikolinearitas, dan heterokedastisitas. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Pengujian ini dilakukan sebelum melakukan pengujian hipotesis.

(i) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal. Cara mendeteksi normalitas dilakukan dengan melihat grafik *histogram* dan *normal probability plot* (Wijaya, 2012).

(ii) Uji Multikoleniaritas

Uji multikolinearitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat inter korelasi yang sempurna diantara beberapa variabel bebas yang digunakan dalam model. Multikolonieritas terjadi jika terdapat hubungan linier antara variabel independen yang dilibatkan dalam model.

Uji asumsi klasik seperti multikolonieritas dapat dilaksanakan dengan jalan meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar variabel independen dengan menggunakan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Batas dari *Variance Inflation Factor (VIF)* adalah 10 dan nilai *tolerance value* adalah 0,1. Jika nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* lebih besar dari 10 dan nilai *tolerance value* kurang dari 0,1 maka terjadi multikolonieritas.

(iii) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dapat diartikan sebagai korelasi yang terjadi diantara anggota-anggota dari serangkaian observasi yang berderetan waktu (apabila datanya *time series*) atau korelasi antara tempat berdekatan (apabila *cross sectional*). Adapun uji ini yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya penyimpangan asumsi klasik ini adalah uji Durbin Watson (D-W stat) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. $1,54 < DW < 2,46$ maka tidak ada autokorelasi
2. $1,21 < DW < 1,54$ atau $2,46 < DW < 2,79$ maka tidak dapat disimpulkan.

3. $DW < 1,21$ atau $DW > 2,79$ maka terjadi autokorelasi.

(iv) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas didalam model regresi dapat menggunakan beberapa cara, salah satunya dengan uji glejser. Dalam hasil pengujian dengan uji glejser ini, jika tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai Absolut Ut (AbsUt), yang dapat dilihat dari probabilitas signifikannya diatas tingkat kepercayaan 5%, maka model regresi yang digunakan tidak mengandung heteroskedastisitas.

(v) Uji Linieritas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Pengujian pada SPSS dengan menggunakan *Test for Linearity* dengan pada taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear apabila nilai *Sig. linearity* lebih < dari tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$), maka regresi linier dapat dipergunakan untuk menjelaskan pengaruh antara variabel-variabel

yang ada

c. Metode Analisis Data

Untuk mengolah data hasil penelitian maka peneliti menggunakan metode analisis sebagai berikut:

(i) Metode Deskriptif

Statistik deskriptif ini bertujuan untuk menguraikan secara deskriptif karakteristik responden dan variabel-variabel penelitian melalui distribusi frekuensi, rata-rata dan persentase.

(ii) Metode Regresi Berganda

Uji regresi ini digunakan untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen (Ghozali, 2006). Persamaan regresi yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang

α = Konstanta (*Intercept*)

$b_1 - b_3$ = Parameter

X_1 = Akuntabilitas

X_2 = Transparansi

X_3 = Partisipasi Penyusunan Anggaran

e = Faktor kesalahan (*Error random*)

Pengujian hipotesis ini digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah

hubungan antara variabel dependen dan variabel bebas. Perhitungan hipotesis statistik disebut signifikan secara statistik apabila H_0 ditolak, sebaliknya disebut tidak signifikan apabila hasil uji statistiknya menunjukkan H_0 diterima (Ghozali, 2006). Untuk mengukur fungsi regresi sampel apakah telah tepat secara statistik dapat diukur dari besarnya nilai koefisien determinan, nilai statistik F dan nilai statistik t.

(iii) Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengukur kekuatan antara dua variabel atau lebih dan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai actual secara statistik, dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik t. perhitungan statistic disebut signifikan secara statistic apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima.

1. Uji Parsial (Uji-t)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah variabel *independen* (X) secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel *dependen* (Y). Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis ini adalah:

- a. Menentukan hipotesis dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} .

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak

Menentukan tingkat signifikansi

- b. Tingkat signifikansi menggunakan alfa 5% (0,05). Signifikansi 5% artinya penelitian ini menentukan resiko kesalahan dalam mengambil keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis yang benar sebanyak-banyaknya 5% dan besar mengambil keputusan sedikitnya 95% (tingkat kepercayaan).

Jika probabilitas > 0.05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak

Jika probabilitas < 0.05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

2. Uji Serempak (Uji-F)

Uji signifikansi simultan atau uji f bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikat. Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis adalah:

- a. Dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel}

Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak

Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

- b. Menentukan tingkat signifikan. Apabila nilai probabilitas signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Apabila nilai probabilitas signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

3. Uji Pengaruh Serempak (Determinasi, R^2)

Koefisien ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh model regresi dapat menerangkan variabel-variabel dependen penelitian. Nilai koefisien R^2 antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil menandakan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen terbatas (Ghozali, 2006). Nilai mendekati satu, berarti hampir semua variabel dependen dapat diterangkan oleh variabel-variabel independen.

I. Defenisi Operasional

Definisi operasional variabel didasarkan pada beberapa sumber atau referensi yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel penelitian ini menggunakan skala likert lima poin. Adapun klasifikasi variabel peneliti adalah sebagai berikut :

a. Variabel Independen antara lain :

1. Akuntabilitas (X_1)

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercaya kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Annisaningrum 2010). Dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator :

- a. Pertanggungjawaban anggaran harus berdasarkan ketentuan hukum dan Peraturan yang berlaku.

- b. Melakukan analisis keuangan/evaluasi setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan.
- c. Pimpinan dan pegawai bersama-sama mempertanggungjawabkan (accountable) hasil dari suatu program/kegiatan yang telah dilakukan.
- d. Adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program atau kebijakan
- e. Pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikator yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu program/kegiatan.
- f. Audit kepatuhan dilakukan agar setiap penggunaan dana dilandasi peraturan dan hukum yang berlaku.
- g. Pengelolaan Anggaran dipertanggung-jawabkan otoritas yang lebih tinggi.

Variabel ini diukur dengan skala likert 5 poin dengan beberapa pertanyaan.

2. Transparansi (X₂)

Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya public kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi, termasuk informasi tentang keuangan serta informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang

berkepentingan Mardiasmo (2004). Dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator :

- a. Pengelolaan keuangan dilakukan secara efektif dan efisien agar mencapai target dan tujuan Pemerintah.
- b. Informasi yang disampaikan sangat akurat terhadap anggaran yang dikelola.
- c. Proses pertanggungjawaban dalam perancangan anggaran diawasi secara terus menerus.
- d. Pelaporan pertanggungjawaban keuangan setiap tahun tepat waktu.
- e. Laporan keuangan disampaikan oleh kepala daerah kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan.
- f. Informasi yang diberikan kepada publik dapat meningkatkan transparansi anggaran.
- g. Transparansi yang positif dapat menunjang kinerja pengelolaan keuangan.

Variabel ini diukur dengan skala likert 5 poin dengan beberapa pertanyaan.

3. Partisipasi Penyusunan Anggaran (X_3)

Partisipasi dalam penyusunan anggaran berarti keikutsertaan operating manager dalam merumuskan bersama dengan komite anggaran mengenai rangkaian kegiatan dimasa yang akan datang yang akan

ditempuh oleh operating manager yang bersangkutan dalam pencapaian sasaran anggaran (Mulyadi, 2001). Dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator :

- a. Dalam menyusun anggaran, semua pihak ikut terlibat.
- b. Saya diberikan banyak kesempatan untuk ikut dalam penyusunan anggaran.
- c. Saya memberikan banyak informasi dalam pelaksanaan penyusunan anggaran.
- d. Kontribusi semua pihak terhadap partisipasi penyusunan anggaran sangat besar.
- e. Saya memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap proses penyusunan anggaran.
- f. Adanya penilaian positif terhadap kontribusi yang diberikan oleh pegawai.
- g. Kendala waktu, menjadikan ketidaksesuaian anggaran terhadap daftar perencanaan.

Variabel ini diukur dengan skala likert 5 poin dengan beberapa pertanyaan.

b. Variabel Dependent antara lain :

1. Kinerja Keuangan Kabupaten Enrekang (Y)

Kinerja dapat dijelaskan sebagai suatu kajian tentang kemampuan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan. Penilaian kinerja dapat

dipakai untuk mengukur kegiatan-kegiatan organisasi dalam pencapaian tujuan dan juga sebagai bahan untuk perbaikan di masa yang akan datang Atmosudirjo (dalam Haryanto, 2009). Dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator :

- a. Perencanaan dan realisasi anggaran dari tahun ke tahun dapat diperbandingkan.
- b. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- c. Mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- d. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
- e. Value for Money merupakan jembatan untuk mengantar pemerintah mencapai Good Governance yaitu pemerintah yang akuntabel, transparan, dan partisipasi.
- f. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- g. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Enrekang terletak antara 3° 14'36" LS dan 119°40'53" BT. Luas Wilayahnya sekitar 1.786,01 km². Jarak dari ibukota Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar) ke Ibukota Enrekang dengan jalan darat sepanjang 235 Km.

Batas-batas wilayah Kabupaten Enrekang, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Tana Toraja
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sidenreng Rappang
- Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang
- Sebelah Timur : Kabupaten Luwu

Ditinjau dari segi daerah administrasi pemerintahan Kabupaten Enrekang terdiri dari 12 Kecamatan meliputi Kecamatan Maiwa, Bungin, Enrekang, Cendana, Baraka, Buntu Batu, Anggeraja, Malua, Alla Curio Masalle dan Baroko. Ibukota Kabupaten Enrekang terletak di wilayah Kecamatan Enrekang.

Kecamatan Enrekang sebagai pusat pemerintahan dan pusat aktifitas sosial ekonomi di Kabupaten Enrekang. Terdiri dari 12 desa dan 6 kelurahan dengan luas sekitar 281 km². Batas Kecamatan Enrekang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Anggeraja
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Cendana

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Baraka dan Bungin
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Pinrang

2. Kondisi Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Enrekang ditandai dengan bentuk wilayah dengan kemiringan lahan dominan di atas 15% . Daerah datar dijumpai di sekitar Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Enrekang. Wilayah pegunungan dan perbukitan merupakan kondisi yang mendominasi wilayah Kabupaten Enrekang. Wilayah Kabupaten Enrekang dialiri oleh sungai besar dan sungai-sungai kecil yang terdapat di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Enrekang. Aliran sungai ini dimanfaatkan untuk sektor pertanian, perkebunan, dan energi. Kondisi topografi dengan kemiringan lereng dan alih fungsi lahan menyebabkan beberapa wilayah Kabupaten Enrekang rawan longsor atau rentan gerakan tanah.

3. Penduduk

Berdasarkan hasil final Sensus Penduduk (SP) Tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Enrekang sebesar 190.175 jiwa. Pada Tahun 2012 Jumlah penduduk Kabupaten Enrekang bertambah menjadi 193.683 jiwa yang terdiri dari 97.427 penduduk laki-laki dan 96.253 penduduk perempuan. Sementara Jumlah penduduk Kecamatan Enrekang Pada Tahun 2012 sebesar 31.069 Jiwa, yang terdiri dari 15.211 Jiwa laki-laki dan 15.858 jiwa perempuan, dengan kepadatan penduduk sebesar 110,31 Jiwa/km².

4. Kondisi Ekonomi

Kondisi perekonomian suatu wilayah sangatlah bergantung pada potensi

sumber daya, serta kemampuan daerah tersebut untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dalam rangka pengembangan potensi daerah, Pemerintah Kabupaten Enrekang telah melakukan berbagai langkah, kebijakan, dan upaya untuk meningkatkan perekonomian di daerah ini.

Beberapa keunggulan potensi daerah dimiliki Kabupaten Enrekang yang secara ekonomis apabila bisa dimanfaatkan dengan baik maka pertumbuhan perekonomian daerah dapat ditingkatkan. Beberapa potensi daerah yang dimaksud adalah :

Posisi wilayah yang strategis

Letak wilayah daerah Kabupaten Enrekang, dilihat dari segi ekonomi cukup strategis, karena termasuk dalam wilayah pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare, merupakan jalur lintas wisatawan dari Kota Makassar ke Kabupaten Tana Toraja.

Kondisi Hidrografis

Potensi sumber daya air yang memadai karena wilayah Kabupaten Enrekang mengalir empat sungai besar yaitu Sungai Saddang dengan panjang 39,107 km, Sungai Bulu Cenrana dengan panjang 68,609 km, Sungai Mata Allo panjang 35,211 km, dan Sungai Malua dengan panjang 39 km. Selain sungai-sungai besar, hampir seluruh wilayah Kabupaten Enrekang terdapat sungai-sungai kecil dan sumber mata air yang dimanfaatkan untuk keperluan air baku dan irigasi.

Ketersediaan infrastruktur

Kelancaran arus transportasi untuk kegiatan ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana jalan. Di wilayah Kabupaten Enrekang, prasarana jalan terbagi menjadi jalan nasional sepanjang 85,160 km, jalan provinsi sepanjang 22,53 km dan jalan Kabupaten sepanjang 1.123,85 km.

Potensi Pertanian dan Perkebunan.

Pembangunan ekonomi Kabupaten Enrekang masih bertumpu pada pembangunan disektor pertanian dengan kontribusi utama subsektor tanaman pangan, sayur-sayuran, buah-buahan, serta sektor perkebunan seperti kopi dan kakao (kontribusi terhadap PDRB sekitar 61 %). Penekanan pembangunan dan pengembangan pada sektor ini didukung oleh wilayah Kabupaten Enrekang yang morfologi dan topografinya sesuai untuk tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan. Dalam jangka panjang, pengembangan tanaman pangan dan perkebunan perlu terus ditingkatkan guna mendukung ketahanan pangan masyarakat, baik pada tingkat lokal maupun nasional, disamping untuk meningkatkan gizi masyarakat melalui penganeekaragaman jenis bahan pangan. Perhatian khusus yang diberikan dalam pengembangan sub-sektor tanaman pangan dan perkebunan adalah peningkatan produktifitas usaha tani, perluasan lahan pertanian, dan peningkatan penggunaan lahan kering. Upaya ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa masih banyak lahan dalam wilayah Kabupaten Enrekang yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Peningkatan pemanfaatan lahan perkebunan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar pada sektor pertanian karena beberapa komoditi

sub sektor perkebunan memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap pangsa pasar produk sektor pertanian. Produk-produk pertanian yang berkualitas mampu dihasilkan di wilayah Kabupaten Enrekang. Pada tahun 2011 luas lahan sawah di Kabupaten Enrekang sebesar 11.814 hektar dengan produksi padi mencapai 67.583 ton, Luas Lahan jagung 8.220 dengan produksi 46.135 ton. Produksi sayur-sayuran seperti kol, sawi, tomat, bawang merah dan produk pertanian lainnya terus mengalami peningkatan. Subsektor peternakan, pada tahun 2011 untuk jenis ternak sapi potong populasinya sebesar 1.897, kambing sebesar 3.443 ekor sementara ternak unggas mencapai 1.025.000 ekor.

Kabupaten Enrekang adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan. Ibukota Kabupaten ini terletak di kota Enrekang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.786,01 km² dan berpenduduk sebanyak ±160.000 jiwa. Kabupaten Enrekang dibawah kepemimpinan bapak Bupati Drs.H. Muslimin Bando, M.Pd dan wakil Bupati Asman, SE yang mempunyai Visi “ Enrekang Maju, Aman, Sejahtera (EMAS) yang berkelanjutan dan Religius”. Dan Misi sebagai berikut : 1). Membangun sistem administrasi Pemerintah daerah yang handal, demokratis, profesional, bersih terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi rakyat, 2). Memberdayakan Sumber Daya Manusia aparatur dalam rangka penerapan disiplin kerja, pelayanan prima dan berkualitas disetiap jenjang organisasi perangkat daerah.

Pemerintah Kabupaten Enrekang membawahi 31 OPD yang memegang peranan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misi, dan bertanggung

jawab terhadap Bupati dalam pelaksanaan tugasnya dan secara administratif mendapat pembinaan dari Sekertariat Daerah.

B. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

Pembahasan mengenai deskripsi responden dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas, Kasubag Keuangan, Kasubag Perencanaan dan Bendahara Pengeluaran di setiap OPD. Selanjutnya dalam melaksanakan penelitian ini, dilakukan penyebaran kuesioner sebesar 56 eksamplar. Adapun deskripsi responden dikelompokkan kedalam jenis kelamin, usia responden, dan jabatan responden. Untuk lebih jelasnya deskripsi responden dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Jenis kelamin responden

Karakteristik responden menurut jenis kelamin responden di Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1 Deskripsi Responden Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekwensi	(%)
Laki-laki	38	67,85
Perempuan	18	32,15
Total	56	100

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui bahwa dari 56 responden, mayoritas responden adalah laki-laki yaitu sebanyak 38 orang (67,85%) sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 18 orang (32,15%).

b. Umur

Karakteristik umur responden di Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Deskripsi Responden Menurut Umur

Umur	Frekwensi	(%)
31 – 40 tahun	31	55,35
41 – 50 tahun	11	19,65
> 50	14	25,00
Total	56	100,0

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa mayoritas responden berumur 31- 40 tahun yaitu sebanyak 31 responden (55,35%), kemudian disusul responden dengan umur 41 – 50 sebanyak 11 orang (19,65%). Sedangkan responden yang berumur di atas 50 tahun sebanyak 14 orang (25,00%).

c. Pendidikan

Karakteristik responden menurut tingkat pendidikan responden di Kabupaten Enrekang terlihat sangat beragam, sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3 Deskripsi Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Frekwensi	(%)
Sarjana (S1)	24	42,86
Pascasarjana (S2)	31	55,36
S3	1	1,78
Total	56	100,0

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa pada umumnya ASN yang dominan pada setiap OPD yang diteliti berpendidikan S1 yaitu sebanyak 24 responden atau (42,86%) kemudian disusul dengan tingkat pendidikan S2 dan pendidikan lainnya masing-masing sebanyak 31 orang responden atau

(55,36%). Adapun dengan tingkat pendidikan S3 adalah sebanyak 1 responden atau (1,78%). Sedangkan tidak ada responden dengan tingkat pendidikan SLTA.

d. Jabatan

Karakteristik responden menurut jabatan responden di Kabupaten Enrekang terlihat sangat beragam, sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4 Deskripsi Responden Menurut Jabatan

Pendidikan	Frekwensi	(%)
Kepala Dinas	14	25,00
Kasubag Keuangan	14	25,00
Kasubag Perencanaan	14	25,00
Bendahara Pengeluaran	14	25,00
Total	56	100,0

Sumber: Data data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa Kepala Dinas yaitu sebanyak 14 responden atau (25,00%). Kasubag Keuangan sebanyak 14 responden atau (25,00%), Kasubag Perencanaan sebanyak 14 responden atau (25,00%), dan Bendaharan pengeluaran sebanyak 14 responden atau (25,00%).

2. Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi variabel penelitian berikut ini menampilkan jawaban responden dalam bentuk distribusi frekuensi. Deskripsi ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan responden terhadap masing-masing indikator dari

variabel yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat diketahui kondisi masing-masing variabel tersebut secara umum. Penelitian ini menggunakan satu variabel terikat yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang (Y), dan 3 variabel bebas yaitu: Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), dan Patisipasi Penyusunan Anggaran (X3). Adapun masing-masing variabel tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Variabel Akuntabilitas (X1)

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Variabel Akuntabilitas (X₁)

Item-Item	Skor										Rata-rata skor
	1		2		3		4		5		
	f	%	F	%	f	%	f	%	f	%	
X _{1,1}	-	-	-	-	1	1,79	34	60,71	21	37,50	4,36
X _{1,2}	-	-	-	-	4	7,14	27	48,21	25	44,64	4,02
X _{1,3}	-	-	-	-	5	8,93	25	44,64	26	46,43	3,93
X _{1,4}	-	-	-	-	8	14,29	32	57,14	16	28,57	4,59
X _{1,5}	-	-	-	-	3	5,36	34	60,71	19	33,93	4,46
X _{1,6}	-	-	-	-	6	10,71	30	53,57	20	35,71	4,34
X _{1,7}	-	-	-	-	2	3,57	29	51,79	25	44,64	4,05
Rata-rata skor variabel											4,25

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dijelaskan jawaban responden berdasarkan item-item pertanyaan akuntabilitas (X1) sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban anggaran harus berdasarkan ketentuan hukum dan Peraturan yang berlaku. Dari 56 responden yang memberikan jawaban terdapat 21 orang yang menyatakan sangat setuju, 34 responden yang menyatakan setuju, dan 1 responden yang mengatakan Ragu-ragu. Sedangkan tidak ada responden yang mengatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Adapun rata-rata skornya adalah 4,36 atau kategori sangat baik.

2. Melakukan analisis keuangan/evaluasi setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan. Dari 56 responden yang memberikan jawaban terdapat 25 orang yang menyatakan sangat setuju, 27 responden yang menyatakan setuju, dan 4 responden yang mengatakan Ragu-ragu. Sedangkan tidak ada responden yang mengatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Adapun rata-rata skornya adalah 4,02 atau kategori baik.
3. Pimpinan dan pegawai bersama-sama mempertanggungjawabkan (accountable) hasil dari suatu program/kegiatan yang telah dilakukan. Dari 56 responden yang memberikan jawaban terdapat 26 orang yang menyatakan sangat setuju, 25 responden yang menyatakan setuju, dan 5 responden yang mengatakan Ragu-ragu. Sedangkan tidak ada responden yang mengatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Adapun rata-rata skornya adalah 3,93 atau kategori cukup baik.
4. Adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program atau kebijakan. Dari 56 responden yang memberikan jawaban terdapat 16 orang yang menyatakan sangat setuju, 32 responden yang menyatakan setuju, dan 8 responden yang mengatakan Ragu-ragu. Sedangkan tidak ada responden yang mengatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Adapun rata-rata skornya adalah 4,59 atau kategori sangat baik.
5. Pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikator yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu program/kegiatan. Dari 56 responden yang memberikan jawaban terdapat 19 orang yang menyatakan sangat setuju, 34 responden yang menyatakan setuju, dan 3 responden yang mengatakan Ragu-ragu. Sedangkan tidak ada responden yang mengatakan tidak setuju dan

sangat tidak setuju. Adapun rata-rata skornya adalah 4,46 atau kategori sangat baik.

6. Audit kepatuhan dilakukan agar setiap penggunaan dana dilandasi peraturan dan hukum yang berlaku. Dari 56 responden yang memberikan jawaban terdapat 20 orang yang menyatakan sangat setuju, 30 responden yang menyatakan setuju, dan 6 responden yang mengatakan Ragu-ragu. Sedangkan tidak ada responden yang mengatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Adapun rata-rata skornya adalah 4,34 atau kategori sangat baik.
7. Pengelolaan Anggaran dipertanggung- jawabkan otoritas yang lebih tinggi. Dari 56 responden yang memberikan jawaban terdapat 25 orang yang menyatakan sangat setuju, 29 responden yang menyatakan setuju, dan 2 responden yang mengatakan Ragu-ragu. Sedangkan tidak ada responden yang mengatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Adapun rata-rata skornya adalah 4,05 atau kategori baik.

b. Variabel Transparansi (X₂)

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Variabel Transparansi (X₂)

Item- Item	Skor										Rata- rata skor
	1		2		3		4		5		
	f	%	F	%	f	%	f	%	f	%	
X _{2.1}	-	-	-	-	5	8,93	40	71,43	11	19,64	4,11
X _{2.2}	-	-	-	-	5	8,93	31	55,36	20	35,71	4,27
X _{2.3}	-	-	-	-	7	12,50	32	57,14	17	30,36	4,18
X _{2.4}	-	-	2	3,57	11	19,64	29	51,79	14	25,00	3,98

X _{2.5}	-	-	-	-	2	3,57	33	58,93	21	37,50	4,34
X _{2.6}	-	-	-	-	6	10,71	30	53,57	20	35,71	4,25
X _{2.7}	-	-	-	-	3	5,36	32	57,14	21	37,50	4,32
Rata-rata skor variabel											4.21

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dijelaskan jawaban responden berdasarkan item-item pertanyaan Transparansi (X₂) sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan dilakukan secara efektif dan efisien agar mencapai target dan tujuan Pemerintah. Dari 56 responden yang memberikan jawaban terdapat 11 orang yang menyatakan sangat setuju, 40 responden yang menyatakan setuju, dan 5 responden yang mengatakan Ragu-ragu. Sedangkan tidak ada responden yang mengatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Adapun rata-rata skornya adalah 4,11 atau kategori cukup baik.
2. Informasi yang disampaikan sangat akurat terhadap anggaran yang dikelola. Dari 56 responden yang memberikan jawaban terdapat 20 orang yang menyatakan sangat setuju, 31 responden yang menyatakan setuju, dan 5 responden yang mengatakan Ragu-ragu. Sedangkan tidak ada responden yang mengatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Adapun rata-rata skornya adalah 4,27 atau kategori sangat baik.
3. Proses pertanggungjawaban dalam perancangan anggaran diawasi secara terus menerus. Dari 56 responden yang memberikan jawaban terdapat 17 orang yang menyatakan sangat setuju, 32 responden yang menyatakan setuju, dan 7 responden yang mengatakan Ragu-ragu dan tidak ada responden mengatakan tidak setuju dan yang mengatakan sangat tidak setuju. Adapun rata-rata skornya adalah 4,18 atau kategori baik.

4. Pelaporan pertanggungjawaban keuangan setiap tahun tepat waktu. Dari 56 responden yang memberikan jawaban terdapat 14 orang yang menyatakan sangat setuju, 29 responden yang menyatakan setuju, dan 11 responden yang mengatakan Ragu-ragu dan 2 responden yang mengatakan tidak setuju , sedangkan tidak ada responden yang mengatakan sangat tidak setuju. Adapun rata-rata skornya adalah 3,98 atau kategori cukup baik
5. Laporan keuangan disampaikan oleh kepala daerah kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan. Dari 56 responden yang memberikan jawaban terdapat 21 orang yang menyatakan sangat setuju, 33 responden yang menyatakan setuju, dan 2 responden yang mengatakan Ragu-ragu. Sedangkan tidak ada responden yang mengatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Adapun rata-rata skornya adalah 4,34 atau kategori sangat baik.
6. Informasi yang diberikan kepada publik dapat meningkatkan transparansi anggaran. Dari 56 responden yang memberikan jawaban terdapat 20 orang yang menyatakan sangat setuju, 30 responden yang menyatakan setuju, dan 6 responden yang mengatakan Ragu-ragu. Sedangkan tidak ada responden yang mengatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Adapun rata-rata skornya adalah 4,25 atau kategori sangat baik.
7. Transparansi yang positif dapat menunjang kinerja pengelolaan keuangan. Dari 56 responden yang memberikan jawaban terdapat 21 orang yang menyatakan sangat setuju, 32 responden yang menyatakan setuju, dan 3 responden yang mengatakan Ragu-ragu. Sedangkan tidak ada responden yang mengatakan

tidak setuju dan sangat tidak setuju. Adapun rata-rata skornya adalah 4,32 atau kategori sangat baik.

c. Variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran (X3)

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran (X₃)

Item-Item	Skor										Rata-rata skor
	1		2		3		4		5		
	f	%	F	%	f	%	f	%	f	%	
X _{3.1}	-	-	-	-	2	3,57	40	71,43	14	25,00	4,21
X _{3.2}	-	-	-	-	11	19,64	28	50,00	17	30,36	4,11
X _{3.3}	-	-	1	1,79	6	10,71	28	50,00	21	37,50	4,23
X _{3.4}	-	-	-	-	8	14,29	24	42,86	24	42,86	4,29
X _{3.5}	-	-	-	-	3	8,93	39	58,93	14	32,14	4,20
X _{3.6}	-	-	-	-	8	10,71	30	58,93	18	32,14	4,18
X _{3.7}	-	-	-	-	4	7,14	31	55,36	21	37,50	4,30
Rata-rata skor variabel											4,22

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dijelaskan jawaban responden berdasarkan item-item pertanyaan Partisipasi Penyusunan Anggaran (X₃) sebagai berikut:

1. Dalam menyusun anggaran, semua pihak ikut terlibat. Dari 56 responden yang memberikan jawaban terdapat 14 orang yang menyatakan sangat setuju, 40 responden yang menyatakan setuju, dan 2 responden yang mengatakan Ragu-ragu. Sedangkan tidak ada responden yang mengatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Adapun rata-rata skornya adalah 4,21 atau kategori baik.
2. Saya diberikan banyak kesempatan untuk ikut dalam penyusunan anggaran. Dari 56 responden yang memberikan jawaban terdapat 17 orang yang menyatakan sangat setuju, 28 responden yang menyatakan setuju, dan 11 responden yang mengatakan Ragu-ragu. Sedangkan tidak ada responden yang mengatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Adapun rata-rata skornya adalah 4,11 atau kategori cukup baik.

3. Saya memberikan banyak informasi dalam pelaksanaan penyusunan anggaran. Dari 56 responden yang memberikan jawaban terdapat 21 orang yang menyatakan sangat setuju, 28 responden yang menyatakan setuju, dan 6 responden yang mengatakan Ragu-raguan 1 responden yang mengatakan tidak setuju, sedangkan tidak ada responden yang mengatakan sangat tidak setuju. Adapun rata-rata skornya adalah 4,23 atau kategori baik.
4. Kontribusi semua pihak terhadap partisipasi penyusunan anggaran sangat besar. Dari 56 responden yang memberikan jawaban terdapat 24 orang yang menyatakan sangat setuju, 24 responden yang menyatakan setuju, dan 8 responden yang mengatakan Ragu-ragu. Sedangkan tidak ada responden yang mengatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Adapun rata-rata skornya adalah 4,29 atau kategori sangat baik.
5. Saya memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap proses penyusunan anggaran. Dari 56 responden yang memberikan jawaban terdapat 14 orang yang menyatakan sangat setuju, 39 responden yang menyatakan setuju, dan 3 responden yang mengatakan Ragu-ragu. Sedangkan tidak ada responden yang mengatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Adapun rata-rata skornya adalah 4,20 atau kategori baik.
6. Adanya penilaian positif terhadap kontribusi yang diberikan oleh pegawai. Dari 56 responden yang memberikan jawaban terdapat 18 orang yang menyatakan sangat setuju, 33 responden yang menyatakan setuju, dan 6 responden yang mengatakan Ragu-ragu. Sedangkan tidak ada responden yang mengatakan

tidak setuju dan sangat tidak setuju. Adapun rata-rata skornya adalah 4,18 atau kategori cukup baik.

7. Kendala waktu, menjadikan ketidaksesuaian anggaran terhadap daftar perencanaan. Dari 56 responden yang memberikan jawaban terdapat 21 orang yang menyatakan sangat setuju, 31 responden yang menyatakan setuju, dan 4 responden yang mengatakan Ragu-ragu. Sedangkan tidak ada responden yang mengatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Adapun rata-rata skornya adalah 4,30 atau kategori sangat baik.

d. Variabel Kinerja Keuangan Kabupaten Enrekang (Y)

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang (Y)

Item-Item	Skor										Rata-rata skor
	1		2		3		4		5		
	f	%	F	%	f	%	f	%	f	%	
Y _{1.1}	-	-	4	7,14	7	12,50	31	55,36	14	25,00	3,98
Y _{1.2}	-	-	-	-	6	10,71	39	69,64	11	19,64	4,09
Y _{1.3}	-	-	-	-	4	7,14	32	57,14	20	35,71	4,29
Y _{1.4}	-	-	-	-	7	12,50	33	58,93	16	28,57	4,16
Y _{1.5}	-	-	3	5,36	11	19,64	32	57,14	10	17,86	3,88
Y _{1.6}	-	-	-	-	2	3,57	35	62,50	19	33,93	4,30
X _{2.7}	-	-	-	-	7	12,50	31	55,36	18	32,14	4,20
Rata-rata skor variabel											4.13

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat dijelaskan jawaban responden berdasarkan item-item pertanyaan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang (Y) sebagai berikut:

1. Perencanaan dan realisasi anggaran dari tahun ke tahun dapat diperbandingkan. Dari 56 responden yang memberikan jawaban terdapat 14 orang yang menyatakan sangat setuju, 31 responden yang menyatakan setuju, dan 7

responden yang mengatakan Ragu-ragu dan 4 responden yang mengatakan tidak setuju, sedangkan tidak ada responden yang mengatakan sangat tidak setuju. Adapun rata-rata skornya adalah 3,98 atau kategori cukup baik.

2. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Dari 56 responden yang memberikan jawaban terdapat 11 orang yang menyatakan sangat setuju, 39 responden yang menyatakan setuju, dan 6 responden yang mengatakan Ragu-ragu. Sedangkan tidak ada responden yang mengatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Adapun rata-rata skornya adalah 4,09 atau kategori cukup baik.
3. Mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah. Dari 56 responden yang memberikan jawaban terdapat 20 orang yang menyatakan sangat setuju, 32 responden yang menyatakan setuju, dan 4 responden yang mengatakan Ragu-ragu. Sedangkan tidak ada responden yang mengatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Adapun rata-rata skornya adalah 4,29 atau kategori sangat baik.
4. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya. Dari 56 responden yang memberikan jawaban terdapat 16 orang yang menyatakan sangat setuju, 33 responden yang menyatakan setuju, dan 7 responden yang mengatakan Ragu-ragu. Sedangkan tidak ada responden yang mengatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Adapun rata-rata skornya adalah 4,16 atau kategori baik.
5. Value for Money merupakan jembatan untuk mengantar pemerintah mencapai Good Governance yaitu pemerintah yang akuntabel, transparan, dan partisipasi.

Dari 56 responden yang memberikan jawaban terdapat 10 orang yang menyatakan sangat setuju, 32 responden yang menyatakan setuju, dan 11 responden yang mengatakan Ragu-raguan 3 responden yang mengatakan tidak setuju, sedangkan tidak ada responden yang mengatakan sangat tidak setuju. Adapun rata-rata skornya adalah 3,88 atau kategori cukup baik.

6. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah. Dari 56 responden yang memberikan jawaban terdapat 19 orang yang menyatakan sangat setuju, 35 responden yang menyatakan setuju, dan 2 responden yang mengatakan Ragu-ragu. Sedangkan tidak ada responden yang mengatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Adapun rata-rata skornya adalah 4,30 atau kategori sangat baik.
7. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu. Dari 56 responden yang memberikan jawaban terdapat 18 orang yang menyatakan sangat setuju, 31 responden yang menyatakan setuju, dan 7 responden yang mengatakan Ragu-ragu. Sedangkan tidak ada responden yang mengatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Adapun rata-rata skornya adalah 4,20 atau kategori baik.

3. Uji Validitas dan Realibilitas

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan alat pengukur dapat mengungkapkan konsep gejala/kejadian yang diukur. Item kuesioner dinyatakan valid apabila nilai r hitung $>$ r tabel, dimana r tabel = 0,2632. Pengujian validitas selengkapnya dapat dilihat pada tabel 11 berikut ini.

Tabel 4.9 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	Koefisien Korelasi	rtabel	Ket.
X1	X1.1	0,669	0.2632	<i>Valid</i>
	X1.2	0,632	0.2632	<i>Valid</i>
	X1.3	0,779	0.2632	<i>Valid</i>
	X1.4	0,579	0.2632	<i>Valid</i>
	X1.5	0,575	0.2632	<i>Valid</i>
	X1.6	0,452	0.2632	<i>Valid</i>
	X1.7	0,314	0.2632	<i>Valid</i>
X2	X2.1	0,493	0.2632	<i>Valid</i>
	X2.2	0,541	0.2632	<i>Valid</i>
	X2.3	0,703	0.2632	<i>Valid</i>
	X2.4	0,652	0.2632	<i>Valid</i>
	X2.5	0,666	0.2632	<i>Valid</i>
	X2.6	0,539	0.2632	<i>Valid</i>
	X2.7	0,359	0.2632	<i>Valid</i>
X3	X3.1	0,426	0.2632	<i>Valid</i>
	X3.2	0,700	0.2632	<i>Valid</i>
	X3.3	0,706	0.2632	<i>Valid</i>
	X3.4	0,648	0.2632	<i>Valid</i>
	X3.5	0,467	0.2632	<i>Valid</i>
	X3.6	0,573	0.2632	<i>Valid</i>
Y	X4.7	0,473	0.2632	<i>Valid</i>
	Y1.1	0,683	0.2632	<i>Valid</i>
	Y1.2	0,628	0.2632	<i>Valid</i>
	Y1.3	0,643	0.2632	<i>Valid</i>
	Y1.4	0,710	0.2632	<i>Valid</i>
	Y1.5	0,752	0.2632	<i>Valid</i>
	Y1.6	0,555	0.2632	<i>Valid</i>
	Y1.7	0,588	0.2632	<i>Valid</i>

Sumber: Data diolah, 2018

Hasil uji validitas pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi antara skor item dengan skor totalnya dari tiap-tiap variabel semua item pertanyaan dalam penelitian ini valid karena nilai rhitung > 0.2632 (rtabel). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa instrumen ini dapat digunakan sebagai instrumen dalam mengukur variabel yang ditetapkan.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi dari suatu variabel. Butir pertanyaan dalam variabel dikatakan reliabel atau terpercaya apabila jawaban responden adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha $\geq 0,60$.

Tabel 4.10 Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Reliabilitas	Ket.
X1	0.656	<i>Reliabel</i>
X2	0.647	<i>Reliabel</i>
X3	0.670	<i>Reliabel</i>
Y	0.773	<i>Reliabel</i>

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa masing-masing variabel, diperoleh nilai Cronbach Alpha $\geq 0,60$. Dengan demikian, maka hasil uji reabilitas terhadap keseluruhan variabel adalah reliabel.

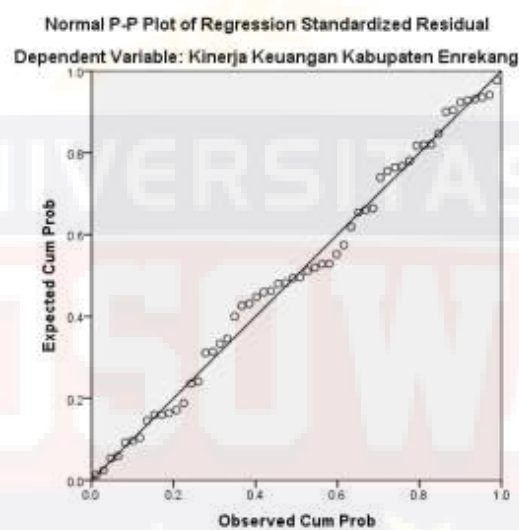
4. Uji Asumsi Klasik

Agar diperoleh nilai estimasi yang tidak biasa dan efisien dari persamaan regresi linier berganda, maka model yang diperoleh selanjutnya akan diperiksa apakah telah memenuhi beberapa asumsi. Asumsi-asumsi tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Untuk menguji atau mendeteksi normalitas ini, diketahui dari tampilan *normal probability plot*. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan

mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Berdasarkan grafik *normal probability plot* seperti yang disajikan pada gambar berikut ini :



Gambar 4.1
Plot P-P Uji Kenormalan Data Residual
Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolenieritas

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF (Variance Inflation Factors) dan nilai tolerance. Jika $VIF < 10$ dan nilai tolerance $> 0,10$ maka dinyatakan terjadi korelasi

sempurna antara variabel independen dan sebaliknya (Ghozali, 2006). Hasil Uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 12 berikut :

Tabel 4.11 Hasil Pemeriksaan Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
Akuntabilitas (X ₁)	0,660	1,516	Tidak terjadi multikolinieritas
Transparansi (X ₂)	0,474	2,109	Tidak terjadi multikolinieritas
Partisipasi Penyusunan Anggaran (X ₃)	0,434	2,303	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa angka tolerance dari variabel independen mempunyai nilai tolerance lebih dari 0,10 yang berarti bahwa tidak ada korelasi antara variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Sementara itu, hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama. Tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan dalam model regresi tidak terjadi multikolinieritas antara variabel independen tersebut.

c. Uji Heterokedastisitas

Untuk menguji heteroskedastisitas ini juga dapat dilakukan dengan uji glejser. Hasil pengujiannya akan disajikan dalam Tabel 4.12. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.12 Uji Glejser Heterokedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	T	Sig.
-------	-----------------------------	---------------------------	---	------

	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.834	1.760	.474	.638	
Akuntabilitas	.015	.063	.041	.242	.809
Transparansi	-.067	.073	-.182	-.915	.364
Partisipasi Penyusunan Anggaran	.062	.073	.177	.851	.398

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan output di atas diketahui bahwa nilai signifikansi variabel Akuntabilitas (X1) sebesar 0,809 lebih besar dari 0,05, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel Akuntabilitas (X1). Nilai signifikan variabel Transparansi (X2) sebesar 0,364 lebih besar 0,05 artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel Transparansi (X2). Sementara itu, diketahui nilai signifikansi Partisipasi Penyusunan Anggaran (X3) yakni 0,398 lebih besar dari 0,05, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel Partisipasi penyusunan anggaran (X3).

d. Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan linier apabila nilai Sig. *linearity* lebih < dari tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$), maka regresi linier dapat dipergunakan untuk menjelaskan pengaruh antara variabel-variabel yang ada. Hasil uji lineritas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13 Uji Linearitas

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kinerja keuangan Kabupaten Enrekang * Akuntabilitas	Between Groups	(Combined)	235.009	10	23.501	4.158	.000
		Linearity	210.681	1	210.681	37.274	.000
		Deviation from Linearity	24.327	9	2.703	.478	.882
	Within Groups		254.348	45	5.652		
	Total		489.357	55			
Kinerja keuangan Kabupaten Enrekang * Transparansi	Between Groups	(Combined)	353.967	11	32.179	10.458	.000
		Linearity	329.532	1	329.532	107.093	.000
		Deviation from Linearity	24.435	10	2.443	.794	.635
	Within Groups		135.390	44	3.077		
	Total		489.357	55			
Kinerja keuangan Kabupaten Enrekang * Partisipasi penyusunan anggaran	Between Groups	(Combined)	278.042	12	23.170	4.715	.000
		Linearity	229.635	1	229.635	46.728	.000
		Deviation from Linearity	48.407	11	4.401	.895	.552
	Within Groups		211.315	43	4.914		
	Total		489.357	55			

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada *Linearity* pada variabel akuntabilitas sebesar 0,000, variabel transparansi adalah sebesar 0,000 dan variabel partisipasi penyusunan anggaran adalah 0,000. Karena signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel independen akuntabilitas, transparansi dan partisipasi penyusunan anggaran terdapat hubungan yang linier dengan variabel kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang.

e. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t - 1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi pada penelitian ini dilakukan pengujian menggunakan uji *Durbin-Watson (DW)*.

Tabel 4.14 Hasil Uji Asumsi Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.868 ^a	.754	.740	1.52179	1.892

a. Predictors: (Constant), Partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas, Transparansi

b. Dependent Variable: kinerja keuangan Kabupaten Enrekang

Sumber: Data diolah, 2018

Pengujian *Durbin-Watson (DW)* dengan level of significance 5% (0,05)

Nilai $DW = 1,892$. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat autokorelasi karena berada $1,54 < DW < 2,46$. Artinya bahwa variabel independent dalam penelitian ini tidak terganggu atau terpengaruhi oleh variabel pengganggu.

5. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dua variabel atau lebih variabel bebas (X) terhadap sebuah variabel terikat (Y) atau untuk membuktikan bahwa terdapat atau tidak terdapatnya hubungan

antara dua variabel atau lebih variabel bebas dengan sebuah variabel terikat.

Analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada Tabel 4.15.

Tabel 4.15. Analisis Regresi Linear Ganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	-6.899	2.928	
Akuntabilitas	.375	.105	.303
Transparansi	.742	.121	.613
Partisipasi penyusunan Anggaran	.088	.121	.076

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi pada tabel 4.15, dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -6.899 + 0,375 \text{ akuntabilitas} + 0,742 \text{ transparansi} + 0,088 \text{ partisipasi penyusunan anggaran}$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi linear berganda tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Konstanta $b_0 = -6.899$. Angka tersebut menunjukkan kinerja keuangan Kabupaten Enrekang bila akuntabilitas, transparansi dan partisipasi penyusunan anggaran konstan atau diabaikan.
2. Koefisien $X_1 = 0,375$. Nilai koefisien positif menunjukkan hubungan positif akuntabilitas terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang. Hal ini berarti bahwa jika terjadi kenaikan akuntabilitas, maka nilai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang akan mengalami peningkatan

sebesar koefisien pengalinya dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan.

3. Koefisien $X_2 = 0,742$. Nilai koefisien positif menunjukkan hubungan positif transparansi terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang. Hal ini berarti bahwa jika terjadi kenaikan transparansi, maka nilai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang akan mengalami peningkatan sebesar koefisien pengalinya dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan.
4. Koefisien $X_3 = 0,088$. Nilai koefisien positif menunjukkan hubungan positif partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang. Hal ini berarti bahwa jika terjadi kenaikan partisipasi penyusunan anggaran, maka nilai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang akan mengalami peningkatan sebesar koefisien pengalinya dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan.

6. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Uji koefisien determinasi (R^2), secara simultan dengan Uji-F dan secara parsial dengan Uji-t. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut :

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menerangkan seberapa besar pengaruh dari seluruh variabel independen akuntabilitas, transparansi dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja keuangan pemerintah

Kabupaten Enrekang. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 4.16.

Tabel 4.16. Nilai Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.868 ^a	.754	.740	1.52179

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi penyusunan anggaran

b. Dependent Variable: Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang

Sumber: Data diolah, 2018

Tabel 4.16 menunjukkan bahwa hasil pengujian determinasi (R²) adalah 0,740. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang adalah sebesar 74,0 persen, sedangkan sisanya 26,0 persen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Sedangkan angka R sebesar 0,868 menggambarkan korelasi atau hubungan variabel terikat dengan variabel bebas artinya adanya hubungan yang positif dan erat antara akuntabilitas, transparansi dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang yang ditunjukkan dengan angka sebesar 86,8%.

b. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Pengujian secara parsial digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen dalam hal ini akuntabilitas, transparansi dan partisipasi penyusunan anggaran secara parsial terhadap variabel dependen kinerja

keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang. Hasil pengujian secara parsial dapat dilihat pada Tabel 4.17.

Untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen (X1,X2 dan X3) terhadap variabel dependen (Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang) secara parsial, dapat dilakukan dengan melihat nilai t-hitung > t-tabel (2.0066) dan $\alpha < 0,05$ sebagaimana yang terlihat pada tabel 4.17.

Tabel 4.17. Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-6.899	2.928		-2.356	.022
Akuntabilitas	.375	.105	.303	3.579	.001
Transparansi	.742	.121	.613	6.135	.000
Partisipasi penyusunan anggaran	.088	.121	.076	.728	.470

a. Dependent Variable: Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang
Sumber : Data diolah, 2018

Untuk mengetahui lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Hasil pengujian terhadap variabel akuntabilitas (X1) menunjukkan bahwa nilai t-hitung $3,579 > t\text{-tabel } 2,0066$, dan tingkat signifikan sebesar $0,001$. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang dan tanda positif menunjukkan arah yang searah antara akuntabilitas dengan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang. Artinya semakin meningkat akuntabilitas maka tingkat kinerja keuangan

pemerintah Kabupaten Enrekang juga akan semakin meningkat. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima.

b. Hasil pengujian terhadap variabel transparansi (X2) menunjukkan bahwa nilai t-hitung $6,135 > t\text{-tabel } 2,0066$; dan tingkat signifikan sebesar $0,000 < \alpha 0,05$. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang dan tanda positif menunjukkan arah yang searah antara transparansi dengan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang. Artinya jika transparansi ditingkatkan maka tingkat kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang juga akan semakin meningkat. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima.

c. Hasil pengujian terhadap variabel partisipasi penyusunan anggaran (X3) menunjukkan bahwa nilai t-hitung $0,728 < t\text{-tabel } 2,0066$; dan tingkat signifikan sebesar $0,470 > \alpha 0,05$. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang. Dengan demikian hipotesis yang diajukan tolak.

c. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji-F)

Pengujian hipotesis secara simultan bertujuan untuk melihat pengaruh semua variabel independen akuntabilitas, transparansi, partisipasi penyusunan anggaran terhadap variabel dependen kinerja keuangan pemerintah

Kabupaten Enrekang. Hasil pengujian hipotesis secara simultan dapat dilihat pada Tabel 4.18.

Tabel 4.18. Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	368.934	3	122.978	53.103	.000 ^b
Residual	120.423	52	2.316		
Total	489.357	55			

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi penyusunan anggaran

b. Dependent Variable: Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 18, nilai F hitung yang diperoleh adalah F hitung $53.103 > F$ tabel 2,78 dengan tingkat signifikan 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikan α 0,05 atau ($0,000 < \alpha$ 0,05). Keputusannya adalah karena nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel maka disimpulkan bahwa secara bersama-sama akuntabilitas, transparansi dan partisipasi penyusunan anggaran secara simultan dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang.

C. Pembahasan

1. Apakah pengaruh Akuntabilitas terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang?

Hasil uji secara parsial dapat diketahui bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada akuntabilitas akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh akuntabilitas mengindikasikan bahwa apabila akuntabilitas mengalami kenaikan maka kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya.

Adanya pengaruh positif dan signifikan akuntabilitas terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang ditentukan oleh peran indikator yang membentuk variabel pelayanan adalah 1) Pertanggungjawaban anggaran harus berdasarkan ketentuan hukum dan Peraturan yang berlaku, 2) Melakukan analisis keuangan/evaluasi setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan, 3) Pimpinan dan pegawai bersama-sama mempertanggungjawabkan (accountable) hasil dari suatu program/kegiatan yang telah dilakukan, 4) Adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program atau kebijakan, 5) Pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikator yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu program/kegiatan, 6) Audit kepatuhan dilakukan agar setiap penggunaan dana dilandasi peraturan dan hukum yang berlaku, 7) Pengelolaan Anggaran dipertanggung-jawabkan otoritas yang lebih

tinggi. Oleh karena itu semua indikator variabel akuntabilitas perlu diterapkan agar kinerja keuangan Kabupaten Enrekang dapat lebih maksimal.

Hasil penelitian dikaitkan dengan teori *agent* yaitu akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak tersebut. Rasul (2002) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan, Annisaningrum (2010) mengemukakan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercaya kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik, dan dipertegas oleh LAN RI dan BPKP (2000) dan Stanbury (dalam Ismiarti, 2013) mengartikan bahwa akuntabilitas sebagai kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Selanjutnya bukti empiris yang mengaitkan akuntabilitas dengan kinerja keuangan menunjukkan hasil yang konsisten dengan penelitian ini, seperti penelitian yang dilakukan oleh Rido (2015), Irna (2016) bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah.

2. Apakah pengaruh transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang?

Hasil uji secara parsial dapat diketahui bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang searah antara transparansi dengan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang, dalam arti jika terjadi peningkatan akuntabilitas, maka kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang akan mengalami peningkatan. Penerapan prinsip keterbukaan atau yang dinamakan transparansi merupakan salah satu cara pemerintah untuk mencapai tujuan menjadi pemerintahan yang bersih (*Good Governance*).

Indikator yang membentuk variabel transparansi adalah 1) Pengelolaan keuangan dilakukan secara efektif dan efisien agar mencapai target dan tujuan Pemerintah, 2) Informasi yang disampaikan sangat akurat terhadap anggaran yang dikelola, 3) Proses pertanggungjawaban dalam perancangan anggaran diawasi secara terus menerus, 4) Pelaporan pertanggungjawaban keuangan setiap tahun tepat waktu, 5) Laporan keuangan disampaikan oleh kepala daerah kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan, 6) Informasi yang diberikan kepada publik dapat meningkatkan transparansi anggaran, 7) Transparansi yang positif dapat menunjang kinerja pengelolaan keuangan. Oleh karena itu semua indikator variabel transparansi perlu diterapkan agar kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang dapat lebih maksimal.

Pentingnya prinsip transparansi lebih dikuatkan melalui UU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), di dalamnya menjelaskan azas keterbukaan (transparansi) pada penyelenggaraan pemerintah daerah, azas untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Krina (2003) mengemukakan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Selanjutnya bukti empiris yang mengaitkan transparansi dengan kinerja keuangan pemerintah menunjukkan hasil yang konsisten dengan penelitian ini, seperti penelitian yang dilakukan oleh ridho (2015), Irna (2016) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah.

3. Apakah pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang?

Hasil uji secara parsial dapat diketahui bahwa variabel partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja

keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang tidak searah antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang.

Indikator yang membentuk variabel partisipasi penyusunan anggaran adalah 1) Dalam menyusun anggaran, semua pihak ikut terlibat, 2) Saya diberikan banyak kesempatan untuk ikut dalam penyusunan anggaran, 3) Saya memberikan banyak informasi dalam pelaksanaan penyusunan anggaran, 4) Kontribusi semua pihak terhadap partisipasi penyusunan anggaran sangat besar, 5) Saya memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap proses penyusunan anggaran, 6) Adanya penilaian positif terhadap kontribusi yang diberikan oleh pegawai, 7) Kendala waktu, menjadikan ketidaksesuaian anggaran terhadap daftar perencanaan.

Berbeda dengan peneliti terdahulu yang berpengaruh dan signifikan, dalam penelitian kali ini partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan karena kurangnya motivasi kerja dan kurangnya komitmen para pegawai yang ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran yang mengakibatkan slack anggaran. Brownell dan McInnes (1986) menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran akan bisa meningkatkan motivasi kerja dan selanjutnya peningkatan motivasi akan meningkatkan kinerja. Peneliti lain juga Shields dan Young (1993) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kesenjangan informasi, semakin tinggi kemungkinan partisipasi penyusunan anggaran tersebut diterapkan.

Partisipasi penyusunan anggaran mempunyai peran yang cukup besar dan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan data yang diperoleh, skor jawaban responden pada partisipasi penyusunan anggaran paling rendah dalam hal pengaruh responden tercermin dalam anggaran final/akhir. Hal tersebut mengindikasikan adanya partisipasi semu (*pseudoparticipation*) yang disebabkan karena pemerintahan tidak sungguh-sungguh dalam menerapkan partisipasi. Bawahan terpaksa menyatakan persetujuan terhadap keputusan yang ditetapkan oleh kepala OPD karena perusahaan memerlukan persetujuan mereka.

4. Apakah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang?

Hasil uji secara simultan dapat diketahui bahwa variabel independen yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi penyusunan anggaran secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang searah antara akuntabilitas, transparansi dan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang.

Dan hasil uji t nya menunjukkan pengaruh yang sangat besar dari ketiga variabel independen terhadap variabel dependennya. Dari ketiga variabel tersebut mengindikasikan hubungan yang sangat erat dan apabila ketiga variabel ini yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi penyusunan anggaran

mengalami kenaikan yang signifikan maka kinerja keuangan akan mengalami kenaikan yg signifikan pula.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Firdansyah (2016) yang menyatakan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dan Rido (2015) tentang transparansi dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Jember.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang. Artinya semakin baik akuntabilitas maka kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang akan semakin meningkat.
2. Secara parsial transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang. Artinya semakin baik transparansi maka kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang akan semakin meningkat.
3. Secara parsial partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang. Hal ini disebabkan oleh motivasi kerja dan komitmen pegawai yang ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran belum ada, yang mengakibatkan slack anggaran yang memaksa para pimpinan untuk mengambil keputusan sendiri.
4. Secara simultan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang. Artinya semakin baik akuntabilitas,

transparansi dan partisipasi penyusunan anggaran maka kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang akan semakin meningkat.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk menjadi pemerintahan yang bertatakelola yang baik (*Good Governance*) maka akuntabilitas, transparansi dan partisipasi penyusunan anggaran harus disosialisasikan dan di terapkan di Kabupaten Enrekang.
2. Bagi aparatur sipil negara yang terlibat langsung maupun yang tidak terlibat secara langsung harus memiliki motivasi dan komitmen kerja yang besar agar Kabupaten Enrekang menjadi pemerintahan yang baik.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan lebih mengembangkan variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang karena masih banyak variabel yang dapat memperjelas kinerja keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugriani, Mulya. (2013). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Bone*. Skripsi.
- Annisaningrum. (2010). *Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Laporan Keuangan*.
- Amirin, T., (2011), *Populasi Dan Sampel Penelitian 4: Ukuran Sampel Rumus Slovin*, Erlangga, Jakarta.
- Agung Gigih Krisherdian. Rido. (2015). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Jember, *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi*, Universitas Jember.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Bungin, Burhan. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Prenadamedia
- Bovens, Mark. 2007. Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. *European law Journal*, 13(4): 447-468.
- Brownell, Peter (1982). *The role of accounting data in performance evolution, budgetary participation, and organizational effectiveness, journal of Accounting Research*, Vol.20, No.1 pp 12-27, spring 1982, Printed in USA.
- Brownell, P, and McInnes, M. (1986). Budgetary Participation, Motivation, and Manajerial perpermace, *The Accounting Review*, 61(4):587-600.
- Dwiyanto, Agus. (2005). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Deddi, Iswahyudi, Maulidah (2007). *Akuntansi Pemerintahan*, Salemba Empat. Jakarta.
- Eisenhardt, Kathleem (1989). Agency Theory: An Assesment and Review. *Academy of Management Review*, 14:57-54.
- Etzioni, Amitai (1982). *Organisasi-Organisasi Modern*. Alih bahasa oleh Suryatim. Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama Universitas Indonesia dan Pustaka Bradjaguna.
- Firdiansyah, Muhammad Adiwirya, (2015). Akuntabilitas, Transparansi dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vo. 11.2.

- Ghozali, L. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: BP.Universitas Diponegoro.
- Haryatmoko, (2011). *Etika Publik*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Haryanto, (2009). *Pengukuran Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jepara Tahun 2007*. Tesis S-2 Universitas Gajahmada Yogyakarta.
- Heald, D. (2007). *Varieties of transparency*. In C Hood & D. Heald (Eds). *Transparency: A key to better government?* (pp.25-43).
- Ismiarti. (2013). *Analisi Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah*. Tesis. Bengkulu. Program Magister Akuntansi FE Unib.
- Isail Mohammad dkk. (2004). *Sitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Edisi ke dua*. Melalui <http://www.lan.go.id>.
- Jensen & Meckling. (1976). *The Theory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure*. *Journal of Financial and Economics*, 3:305-360.
- Kahneman, D, and A. Tversky (1979). *Prospect Theory. An Analysis Decision Under Risk*. *Econometrica*, 47:263-291.
- Krina P, Loina Lalolo. (2003). *Indikator & Alat Ukur Prinsip, Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Komaruddin, dan Satmoko, (2009). *Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Kasus Teknologi Pengelolaan Air Bersih Dan Air Limbah Domestik*, JAI Vol 5 No.1.2009.
- Mahsun, Mohammad. (2009). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2001). *Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah*. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 3:2.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: CV.Andi Offset.
- Mardiasmo, (2006). *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publk: Suatu Sarana Good Governance*, *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Volume 2 (1).
- Mardiasmo, (2009). *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta.

- Mahmudi. (2011). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Mariam, Rani. (2009). *Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Kepuasan Kerja Karyawan Sebagai Variabel Intervening Studi Pada Kantor Pusat Pt.Asuransi Jasa Indonesia (Persero)*, Tesis Program Studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Mulyawan, Budi. (2009). *Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi (Studi Pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang)*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- Mulyadi. (2001). *Manajemen Keuangan: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, Malang: Bayumedia
- Putu Intan Permata Sari, Desak. (2014). Pengaruh Akuntabilitas, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Jurnal Akuntansi* Vol.2 No.1
- Pieris dan Nizam. (2008). *Etika Bisnis & Good Corporate Governance*. Edisi Kedua. Jakarta : Pelangi Cendekia.
- Riduwan. (2004). *Metode & Teknik menyusun Tesis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Rasul, syahrudin. (2002). *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU No,17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta:PNRI
- Sa'adah, Binti. (2015). *Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Melalui E-Government. Studi tentang di Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar*. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol 3 No.2
- Sugiyono. (2003). *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi 1, Bandung: Alfabeta
- _____ (2012). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung Alfabeta.
- Supriyono. 1987. *Akuntansi Biaya : Perencanaan & Pengendalian Biaya serta Pembuatan Keputusan*. Edisi 2. BPFE Yogyakarta.
- Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha Ilmu.Yogyakarta
- Setiyanningrum, Irna. (2016). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep Value For Money pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Sinclair A. (1995). The Camelion of Accountability: forms and discourses. *Accounting, organization and Society*, 20(2): 219-237.

- Shields, M. D., and S. M. Young. (1993). Antecedents and Consequences of Participative Budgeting: Evidence on The Effects of Asymmetrical Information. *Journal of Management Accounting Research* 5: 265-276
- Suharso Puguh, (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis*. Jakarta: PT.Remaja Rosida Karya.
- Turner, Mark and Hulme, David. (1997). *Governance, Administrasi, and Development: Making The State Work*, London: MacMillan Press Ltd.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Waheduzzaman. (2008). *Good Gvernance In Democratic Developing Countries: A.Paradox*. *Journal School of Management*. Victoria University, Melbourne. Australia. Page 1-8.pdf.
- Wijaya, Tony. (2012). *Cepat Menguasai SPSS 20 untuk Olah dan Interpretasi Data*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta
- Woluyo, (2007). *Manajemen Publik (Konsep Aplikasi dan Implementasi Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI). (2004). *Memahami Good Government Governance dan Good Coorporate Governance*, Yogyakarta: Penerbit YPAPI.

Lampiran 1 : Surat ijin Penelitian

104


PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax (0420)-21079

ENREKANG

Enrekang, 17 Desember 2018

Kepada

Nomor : 625/DPMTSP/IP/XII/2018 Yth. 1. Kepala Inspektorat Kab. Enrekang
Lampiran : - 2. Kepala BPKD Kab. Enrekang
Perihal : Izin Penelitian 3. Kepala Dinas PUJ Kab. Enrekang
4. Kepala Dinas Perkim-TR
Kab. Enrekang
5. Kepala BAPENDA Kab. Enrekang
6. Kepala DISDUKCAPIL Kab. Enrekang
7. Kepala Dinas Pertanian
Kab. Enrekang
8. Direktur RSUD Massenrempulu
Kab. Enrekang
9. Kepala DISNAKIN Kab. Enrekang
10. Kepala DISPUSTAKA Kab. Enrekang
11. Kepala DISPOPAR Kab. Enrekang
12. Kepala DISPERINDAG Kab. Enrekang
13. Kepala DISHUB Kab. Enrekang
14. Kepala DISDIKBUD Kab. Enrekang

Masing-Masing
Di
Tempat

Berdasarkan surat dari Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa, Nomor: 513/A.01/PPs/UNIBOS/XII/2018 Tanggal 04 Desember 2018, menerangkan bahwa mahasiswi tersebut di bawah ini :

Nama : Haeranl Halim
Tempat Tanggal Lahir : Enrekang, 29 Agustus 1984
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl. Pangeran Hidayat No. 35 Enrekang Kec. Enrekang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan tesis dengan judul: **"Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang"**

Dilaksanakan mulai, Tanggal 17 Desember 2018 s/d 17 Januari 2019

Pengikut/Anggota :-

Pada Prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan.
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas fotocopy hasil tesis kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian

a.n. BUPATI ENREKANG
Kepala DPM PTSP Kab. Enrekang

HARWAN SAWATI, SE
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19670329 198612 1 001

Tembusan Tth :

01. Bupati Enrekang (Sebagai Laporan)
02. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Enrekang.
03. Kepala SAKESEBANG PDL Kab. Enrekang.
04. Camat Enrekang.
05. Universitas Bosowa.
06. Yang bersangkutan (Honorif Nefine).
07. Peringgal.

UNIVERSITAS

BOSOWA



Lampiran 2 :

SURAT PERMOHONAN PENGISIAN KUESIONER

Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner
Kepada Yth : Bapak/Ibu Responden
Di
Tempat.

Dengan hormat, Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam penyelesaian pendidikan Program Studi Manajemen Universitas Bosowa Makassar. Bersama ini saya memohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran, Kasubag Keuangan, dan Kasubag Perencanaan, saya memerlukan beberapa informasi sebagai bahan penelitian Tesis yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang”

Sehubungan dengan itu, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan petunjuk pengisiannya. Kuesioner ini didesain untuk menilai Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Penyusunan Anggaran ditempat bapak/ibu bekerja. Seluruh informasi yang diperoleh dari kuesioner ini hanya akan saya gunakan untuk keperluan penelitian saja dan saya akan menjaga kerahasiaannya sesuai dengan etika penelitian. Saya harap Bapak/Ibu dapat mengembalikan kuesioner ini.

Atas kesedian Bapak/Ibu yang telah meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

Enrekang, Nopember 2018

Haerani Halim

DATA RESPONDEN

I. IDENTITAS RESPONDEN

Mohon Bapak/Ibu mengisi daftar pertanyaan berikut:

Nama : _____
Jenis Kelamin : Pria Wanita
Umur : ____ tahun
Pendidikan Terakhir : SMA D3 S1 S2 Lainnya _____
Jabatan : _____

II. DAFTAR PERTANYAAN

Bapak/Ibu dimohon untuk mengisi pertanyaan berikut dengan memberikan tanda checklist (v) dalam kolom yang disediakan dengan keterangan : STS: Sangat Tidak Setuju; TS: Tidak Setuju; RG: Ragu-Ragu; S: Setuju; SS :Sangat Setuju

A. VARIABEL INDEPENDEN

1. AKUNTABILITAS (X₁)

No	Pernyataan	SS	S	RG	TS	STS
1.	Pertanggungjawaban anggaran harus berdasarkan ketentuan hukum dan Peraturan yang berlaku.					
2.	Melakukan analisis keuangan/evaluasi setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan.					
3.	Pimpinan dan pegawai bersama-sama mempertanggungjawabkan (accountable) hasil dari suatu program/kegiatan yang telah dilakukan.					
4.	Adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program atau kebijakan.					
5.	Pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikator yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu					

	program/kegiatan.					
6.	Audit kepatuhan dilakukan agar setiap penggunaan dana dilandasi peraturan dan hukum yang berlaku.					
7.	Pengelolaan Anggaran dipertanggungjawabkan otoritas yang lebih tinggi.					

2. TRANSPARANSI (X₂)

No	Pernyataan	SS	S	RG	TS	STS
1.	Pengelolaan keuangan dilakukan secara efektif dan efisien agar mencapai target dan tujuan Pemerintah.					
2.	Informasi yang disampaikan sangat akurat terhadap anggaran yang dikelola.					
3.	Proses pertanggungjawaban dalam perancangan anggaran diawasi secara terus menerus.					
4.	Pelaporan pertanggungjawaban keuangan setiap tahun tepat waktu.					
5.	Laporan keuangan disampaikan oleh kepala daerah kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan.					
6.	Informasi yang diberikan kepada publik dapat meningkatkan transparansi anggaran.					
7.	Transparansi yang positif dapat menunjang kinerja pengelolaan keuangan.					

3. PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN (X₃)

No	Pernyataan	SS	S	RG	TS	STS
1.	Dalam menyusun anggaran, semua pihak ikut terlibat.					
2.	Saya diberikan banyak kesempatan untuk ikut dalam penyusunan anggaran.					
3.	Saya memberikan banyak informasi dalam pelaksanaan penyusunan anggaran.					
4.	Kontribusi semua pihak terhadap partisipasi penyusunan anggaran sangat besar.					

5.	Saya memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap proses penyusunan anggaran.					
6.	Adanya penilaian positif terhadap kontribusi yang diberikan oleh pegawai.					
7.	Kendala waktu, menjadikan ketidaksesuaian anggaran terhadap daftar Perencanaan.					

B. VARIABEL DEPENDEN

KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH (Y)

No	Pernyataan	SS	S	RG	TS	STS
1.	Perencanaan dan realisasi anggaran dari tahun ke tahun dapat diperbandingkan.					
2.	Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.					
3.	Mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.					
4.	Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.					
5.	Value for Money merupakan jembatan untuk mengantar pemerintah mencapai Good Governance yaitu pemerintah yang akuntabel, transparan, dan partisipasi.					
6.	Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.					
7.	Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu.					

--TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI ANDA--

Lampiran 4 : Hasil Olah Data SPSS

DESKRIPSI FREKWENSI KARAKTERISTIK RESPONDEN

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	38	67.9	67.9	67.9
	Perempuan	18	32.1	32.1	100.0
	Total	56	100.0	100.0	

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	31-40	31	55.4	55.4	55.4
	41-50	11	19.6	19.6	75.0
	50-100	14	25.0	25.0	100.0
	Total	56	100.0	100.0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S1	24	42.9	42.9	42.9
	S2	31	55.4	55.4	98.2
	S3	1	1.8	1.8	100.0
	Total	56	100.0	100.0	

Jabatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Bendahara Pengeluaran	14	25.0	25.0	25.0
	Kasubag Perencanaan	14	25.0	25.0	50.0
	Kasubag Keuangan	14	25.0	25.0	75.0
	Kepala Dinas	14	25.0	25.0	100.0

Total	56	100.0	100.0
-------	----	-------	-------

DESKRIPSI VARIABEL PENELITIAN

X1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-Ragu	1	1.8	1.8	1.8
	setuju	34	60.7	60.7	62.5
	sangat setuju	21	37.5	37.5	100.0
	Total	56	100.0	100.0	

X1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-Ragu	4	7.1	7.1	7.1
	setuju	27	48.2	48.2	55.4
	sangat setuju	25	44.6	44.6	100.0
	Total	56	100.0	100.0	

X1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-Ragu	5	8.9	8.9	8.9
	setuju	25	44.6	44.6	53.6
	sangat setuju	26	46.4	46.4	100.0
	Total	56	100.0	100.0	

X1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-Ragu	8	14.3	14.3	14.3
	setuju	32	57.1	57.1	71.4
	sangat setuju	16	28.6	28.6	100.0
	Total	56	100.0	100.0	

X1.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-Ragu	3	5.4	5.4	5.4

	setuju	34	60.7	60.7	66.1
	sangat setuju	19	33.9	33.9	100.0
	Total	56	100.0	100.0	

X1.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Ragu-Ragu	6	10.7	10.7	10.7
Valid	setuju	30	53.6	53.6	64.3
	sangat setuju	20	35.7	35.7	100.0
	Total	56	100.0	100.0	

X1.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Ragu-Ragu	2	3.6	3.6	3.6
Valid	setuju	29	51.8	51.8	55.4
	sangat setuju	25	44.6	44.6	100.0
	Total	56	100.0	100.0	

VARIABEL TRANSPARANSI (X2)

X2.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Ragu-Ragu	5	8.9	8.9	8.9
Valid	setuju	40	71.4	71.4	80.4
	sangat setuju	11	19.6	19.6	100.0
	Total	56	100.0	100.0	

X2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Ragu-Ragu	5	8.9	8.9	8.9
Valid	setuju	31	55.4	55.4	64.3
	sangat setuju	20	35.7	35.7	100.0
	Total	56	100.0	100.0	

X2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-Ragu	7	12.5	12.5	12.5

setuju	32	57.1	57.1	69.6
sangat setuju	17	30.4	30.4	100.0
Total	56	100.0	100.0	

X2.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak setuju	2	3.6	3.6	3.6
Ragu-Ragu	11	19.6	19.6	23.2
Valid setuju	29	51.8	51.8	75.0
sangat setuju	14	25.0	25.0	100.0
Total	56	100.0	100.0	

X2.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Ragu-Ragu	2	3.6	3.6	3.6
Valid setuju	33	58.9	58.9	62.5
sangat setuju	21	37.5	37.5	100.0
Total	56	100.0	100.0	

X2.6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Ragu-Ragu	6	10.7	10.7	10.7
Valid setuju	30	53.6	53.6	64.3
sangat setuju	20	35.7	35.7	100.0
Total	56	100.0	100.0	

X2.7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Ragu-Ragu	3	5.4	5.4	5.4
Valid setuju	32	57.1	57.1	62.5
sangat setuju	21	37.5	37.5	100.0
Total	56	100.0	100.0	

VARIABEL PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN (X3)

X3.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
--	-----------	---------	---------------	--------------------

	Ragu-Ragu	2	3.6	3.6	3.6
Valid	setuju	40	71.4	71.4	75.0
	sangat setuju	14	25.0	25.0	100.0
	Total	56	100.0	100.0	

X3.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-Ragu	11	19.6	19.6	19.6
	setuju	28	50.0	50.0	69.6
	sangat setuju	17	30.4	30.4	100.0
	Total	56	100.0	100.0	

X3.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak setuju	1	1.8	1.8	1.8
	Ragu-Ragu	6	10.7	10.7	12.5
	setuju	28	50.0	50.0	62.5
	sangat setuju	21	37.5	37.5	100.0
	Total	56	100.0	100.0	

X3.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-Ragu	8	14.3	14.3	14.3
	setuju	24	42.9	42.9	57.1
	sangat setuju	24	42.9	42.9	100.0
	Total	56	100.0	100.0	

X3.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-Ragu	3	5.4	5.4	5.4
	setuju	39	69.6	69.6	75.0
	sangat setuju	14	25.0	25.0	100.0
	Total	56	100.0	100.0	

X3.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent

	Ragu-Ragu	8	14.3	14.3	14.3
Valid	setuju	30	53.6	53.6	67.9
	sangat setuju	18	32.1	32.1	100.0
	Total	56	100.0	100.0	

X3.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-Ragu	4	7.1	7.1	7.1
	setuju	31	55.4	55.4	62.5
	sangat setuju	21	37.5	37.5	100.0
	Total	56	100.0	100.0	

VARIABEL KINERJA KEUANGAN KABUPATEN ENREKANG (Y)

Y.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak setuju	4	7.1	7.1	7.1
	Ragu-Ragu	7	12.5	12.5	19.6
	setuju	31	55.4	55.4	75.0
	sangat setuju	14	25.0	25.0	100.0
	Total	56	100.0	100.0	

Y.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-Ragu	6	10.7	10.7	10.7
	setuju	39	69.6	69.6	80.4
	sangat setuju	11	19.6	19.6	100.0
	Total	56	100.0	100.0	

Y.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-Ragu	4	7.1	7.1	7.1
	setuju	32	57.1	57.1	64.3
	sangat setuju	20	35.7	35.7	100.0
	Total	56	100.0	100.0	

Y.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Ragu-Ragu	7	12.5	12.5	12.5
Valid setuju	33	58.9	58.9	71.4
sangat setuju	16	28.6	28.6	100.0
Total	56	100.0	100.0	

Y.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak setuju	3	5.4	5.4	5.4
Ragu-Ragu	11	19.6	19.6	25.0
Valid setuju	32	57.1	57.1	82.1
sangat setuju	10	17.9	17.9	100.0
Total	56	100.0	100.0	

Y.6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Ragu-Ragu	2	3.6	3.6	3.6
Valid setuju	35	62.5	62.5	66.1
sangat setuju	19	33.9	33.9	100.0
Total	56	100.0	100.0	

Y.7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Ragu-Ragu	7	12.5	12.5	12.5
Valid setuju	31	55.4	55.4	67.9
sangat setuju	18	32.1	32.1	100.0
Total	56	100.0	100.0	

UJI VALIDITAS DAN REABILITAS
Variabel Akuntabilitas (X1)

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	TOTALX1
X1.1	Pearson Correlation	1	.480**	.513**	.333*	.391**	.055	-.013	.66
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.012	.003	.689	.923	.0
	N	56	56	56	56	56	56	56	
X1.2	Pearson Correlation	.480**	1	.458**	.228	.208	.126	.019	.63
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.092	.123	.354	.887	.0
	N	56	56	56	56	56	56	56	
X1.3	Pearson Correlation	.513**	.458**	1	.348**	.498**	.164	.118	.77
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.009	.000	.226	.387	.0
	N	56	56	56	56	56	56	56	
X1.4	Pearson Correlation	.333*	.228	.348**	1	.537**	.000	-.164	.57
	Sig. (2-tailed)	.012	.092	.009		.000	1.000	.227	.0
	N	56	56	56	56	56	56	56	
X1.5	Pearson Correlation	.391**	.208	.498**	.537**	1	-.101	-.204	.57
	Sig. (2-tailed)	.003	.123	.000	.000		.459	.131	.0
	N	56	56	56	56	56	56	56	
X1.6	Pearson Correlation	.055	.126	.164	.000	-.101	1	.516**	.45
	Sig. (2-tailed)	.689	.354	.226	1.000	.459		.000	.0
	N	56	56	56	56	56	56	56	
X1.7	Pearson Correlation	-.013	.019	.118	-.164	-.204	.516**	1	.3
	Sig. (2-tailed)	.923	.887	.387	.227	.131	.000		.0
	N	56	56	56	56	56	56	56	
TOTALX1	Pearson Correlation	.669**	.632**	.779**	.579**	.575**	.452**	.314*	
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.018	
	N	56	56	56	56	56	56	56	

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

RELIABILITY

Case Processing Summary

	N	%

Y.7	Pearson Correlation	.213	.258	.231	.506**	.309*	.192	1	.588**
	Sig. (2-tailed)	.115	.055	.087	.000	.020	.155		.000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56
TOTALY	Pearson Correlation	.683**	.628**	.643**	.710**	.752**	.555**	.588**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

RELIABILITY

Case Processing Summary

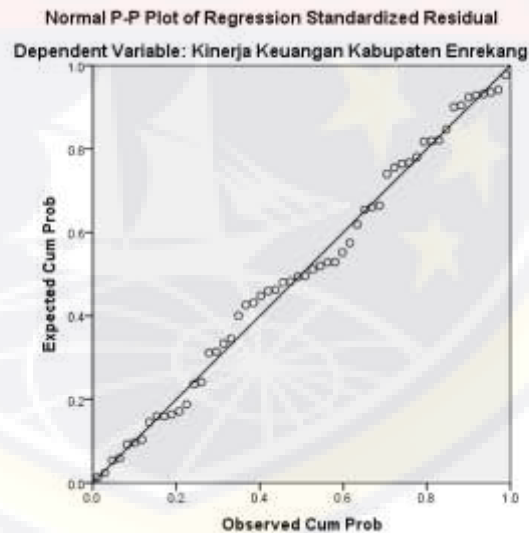
		N	%
Cases	Valid	56	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	56	100.0

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.773	7

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

UJI NORMALITAS



UJI MULTIKOLINEARITAS

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
-------	-----------------------------	---------------------------	---	------	-------------------------

Kinerja		(Combined)	353.967	11	32.179	10.458	.000
Keuangan	Between Groups	Linearity	329.532	1	329.532	107.093	.000
Kabupaten		Deviation from Linearity	24.435	10	2.443	.794	.635
Enrekang *	Within Groups		135.390	44	3.077		
Transparansi	Total		489.357	55			

Kinerja Keuangan Kabupaten Enrekang * Partisipasi penyusunan anggaran

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kinerja Keuangan	Between	(Combined)	278.042	12	23.170	4.715	.000
Kabupaten Enrekang *	Groups	Linearity	229.635	1	229.635	46.728	.000
Partisipasi penyusunan anggaran		Deviation from Linearity	48.407	11	4.401	.895	.552
	Within Groups		211.315	43	4.914		
	Total		489.357	55			

UJI AUTOKORELASI

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.868 ^a	.754	.740	1.52179	1.892

a. Predictors: (Constant), Partisipasi penyusunan anggaran, Akuntabilitas, Transparansi

b. Dependent Variable: Kinerja keuangan kabupaten Enrekang

UJI REGRESI LINEAR BERGANDA

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6.899	2.928		-2.356	.022
	Akuntabilitas (X1)	.375	.105	.303	3.579	.001
	Transparansi (X2)	.742	.121	.613	6.135	.000

	Partisipasi Penyusunan Anggaran (X3)	.088	.121	.076	.728	.470
--	--------------------------------------	------	------	------	------	------

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Kabupaten Enrekang (Y)

UJI KOEFISIEN DETERMINASI (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.868 ^a	.754	.740	1.52179

a. Predictors: (Constant), Partisipasi Penyusunan Anggaran (X3), Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2)

Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6.899	2.928		-2.356	.022
	Akuntabilitas (X1)	.375	.105	.303	3.579	.001
	Transparansi (X2)	.742	.121	.613	6.135	.000
	Partisipasi Penyusunan Anggaran (X3)	.088	.121	.076	.728	.470

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Kabupaten Enrekang (Y)

Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	368.934	3	122.978	53.103	.000 ^b
	Residual	120.423	52	2.316		
	Total	489.357	55			

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Kabupaten Enrekang (Y)

b. Predictors: (Constant), Partisipasi Penyusunan Anggaran (X3), Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2)